

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM RUMAH TAHANAN NEGARA KLAS I JAKARTA PUSAT**

#### **2.1. Lokasi Penelitian**

Penelitian tesis yang berjudul Strategi Rumah Tahanan Klas I Jakarta Pusat Dalam Menanggulangi Tindak Kekerasan Antar Tahanan dan Narapidana ini dilakukan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Klas I Jakarta Pusat, yang merupakan salah satu unit pelaksana teknis pada jajaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Rutan Klas I Jakarta Pusat, yang lebih dikenal masyarakat umum dengan sebutan penjara Salemba adalah salah satu instansi yang tidak dapat dipisahkan dari instansi penegak hukum lainnya dalam Sistem Peradilan Terpadu Indonesia.

Ketertarikan penulis memilih Rutan Klas 1 Jakarta Pusat sebagai lokasi penelitian dikarenakan karakteristiknya yang unik dibandingkan Rutan/LAPAS lainnya di Indonesia. Karakteristik unik tersebut adalah sebagai berikut:

- A.** Klasifikasinya adalah Rutan yang dihuni oleh para tahanan dan narapidana, dibandingkan dengan LAPAS yang hanya dihuni oleh para narapidana.
- B.** Lokasinya terletak di kota Jakarta sebagai kota terbesar di Indonesia, dengan tingkat kompleksitas tertinggi dalam ragam nasionalitas, suku bangsa, budaya, latar belakang, karakteristik, permasalahan serta modus operandi kejahatannya.
- C.** Rutan dengan cakupan wilayah penanganan Tempat Kejadian Perkara yang lebih luas dan kompleks dibanding Rutan lainnya di Jakarta, karena menangani wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Barat dan Jakarta Timur.



**Gambar 5**  
**Tampak Muka Rutan Klas I Jakarta Pusat**

Rutan Klas I Jakarta Pusat memiliki fasilitas daya tampung hunian sekitar  $\pm$  853 orang terletak di Jalan Percetakan Negara Nomor 88, Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, Kotamadya Jakarta Pusat, Propinsi DKI Jakarta dan melayani 3 (tiga) wilayah penangkapan, yaitu Wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Barat dan Jakarta Utara. Letak geografis Rutan Klas I Jakarta Pusat mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut : sebelah utara berbatasan dengan jalan Percetakan Negara Raya; sebelah timur berbatasan dengan jalan Percetakan Negara IX; sebelah selatan berbatasan dengan jalan Percetakan Negara VII; sebelah barat berbatasan dengan Jalan Percetakan Negara VII.

Sekarang ini Rutan Klas I Jakarta Pusat telah memiliki gedung yang baru dengan tiga tingkat yang terdiri dari beberapa blok hunian dan sedang melakukan persiapan pelaksanaan pembangunan gedung tahap kedua yakni LAPAS Salemba. Dengan demikian gedung Rutan Klas I Jakarta Pusat akan dibagi menjadi 2 (dua) bagian yang nantinya akan diperuntukkan bagi tahanan atau narapidana dengan kasus kriminal umum dan tahanan atau narapidana

dengan perkara narkoba. Upaya pembangunan gedung baru tersebut dilaksanakan, selain dikarenakan gedung bangunan lama sudah kurang layak huni dan segi pengamanan, berkaitan pula dengan potensi terus meningkatnya jumlah penghuni penjara, termasuk pada Rutan Klas I Jakarta Pusat.



**Gambar 6**  
**Gerbang Depan Rutan Klas I Jakarta Pusat**

**Tabel 4,5,6 dan 7** di balik ini akan memberikan gambaran riil overkapasitas yang terjadi pada Rutan Klas 1 Jakarta Pusat. Setiap gedung (tipe I, III, V dan VII) yang dimiliki Rutan, bahkan pada setiap blok, dihuni oleh Tahanan/Narapidana dengan jumlah yang melebihi kapasitas ideal alokasinya. Lebih daripada itu, keempat aula (blok Y-1,Y-2, A-1 dan A-2) yang seharusnya adalah tempat Tahanan/Narapidana beraktifitas bahkan dialihkan fungsinya menjadi blok hunian bagi 769 (tujuh ratus enam puluh sembilan) Tahanan/Narapidana.

**Tabel 4**  
**Pemakaian Gedung Baru Tipe I**  
**10 Mei 2007**

<b>NO</b>	<b>BLOK</b>	<b>JUMLAH KAMAR</b>	<b>KAPASITAS KAMAR</b>	<b>KAPASITAS BLOK</b>	<b>ISI SAAT INI</b>	<b>LUAR KAMAR</b>	<b>KETE- RANGAN</b>
01	L	24 Kamar	1 Orang	24 Orang	68 Orang	20 Orang	-
02	M	24 Kamar	1 Orang	24 Orang	74 Orang	26 Orang	-
03	N	24 Kamar	1 Orang	24 Orang	58 Orang	10 Orang	Isolasi
04	O	24 Kamar	1 Orang	24 Orang	61 Orang	13 Orang	-
05	Y-1	-	-		135 Orang	25 Orang	Aula
06	Y-2	-	-		118 Orang	8 Orang	Aula
				<b>96 Orang</b>	<b>514 Orang</b>	<b>102 Orang</b>	

Sumber: Data KP. Rutan-Mei 2007



**Tabel 5**  
**Pemakaian Gedung Baru Tipe III**  
**10 Mei 2007**

<b>NO</b>	<b>BLOK</b>	<b>JUMLAH KAMAR</b>	<b>KAPASITAS KAMAR</b>	<b>KAPASITAS BLOK</b>	<b>ISI SAAT INI</b>	<b>LUAR KAMAR</b>	<b>KETE-RANGAN</b>
01	S	24 Kamar	3 Orang	72 Orang	119 Orang	-	-
02	T	24 Kamar	3 Orang	72 Orang	145 Orang	-	-
03	U	24 Kamar	3 Orang	72 Orang	130 Orang	-	-
04	DPR	-	-		41 Orang	1 Orang	DAPUR
				<b>216 Orang</b>	<b>435 Orang</b>	<b>1 Orang</b>	

Sumber: Data KP. Rutan-Mei 2007

**Tabel 6**

**Pemakaian Gedung Baru Tipe V**  
**10 Mei 2007**

<b>NO</b>	<b>BLOK</b>	<b>JUMLAH KAMAR</b>	<b>KAPASITAS KAMAR</b>	<b>KAPASITAS BLOK</b>	<b>ISI SAAT INI</b>	<b>LUAR KAMAR</b>	<b>KETE- RANGAN</b>
01	V	18 Kamar	5 Orang	90 Orang	144 Orang	-	-
02	W	18 Kamar	5 Orang	90 Orang	136 Orang	-	-
03	X	18 Kamar	5 Orang	90 Orang	127 Orang	-	-
				<b>270 Orang</b>	<b>407 Orang</b>	-	

Sumber: Data KP. Rutan-Mei 2007

**Tabel 7**  
**Pemakaian Gedung Baru Tipe VII**  
**10 Mei 2007**

<b>NO</b>	<b>BLOK</b>	<b>JUMLAH KAMAR</b>	<b>KAPASITAS KAMAR</b>	<b>KAPASITAS BLOK</b>	<b>ISI SAAT INI</b>	<b>LUAR KAMAR</b>	<b>KETE- RANGAN</b>
01	A-1	-	-		259 Orang	59 Orang	Aula
02	A-2	-	-		257 Orang	57 Orang	Aula
03	B	5 Kamar	7 Orang	35 Orang	90 Orang	5 Orang	-
04	C	5 Kamar	7 Orang	35 Orang	90 Orang	5 Orang	-
05	D	5 Kamar	7 Orang	35 Orang	91 Orang	6 Orang	-
06	E	5 Kamar	7 Orang	35 Orang	89 Orang	4 Orang	-
07	F	5 Kamar	7 Orang	35 Orang	101 Orang	16 Orang	-
08	G	5 Kamar	7 Orang	35 Orang	94 Orang	9 Orang	-
09	H	5 Kamar	7 Orang	35 Orang	98 Orang	13 Orang	-
10	I	5 Kamar	7 Orang	35 Orang	95 Orang	10 Orang	-
				<b>280 Orang</b>	<b>1264 Orang</b>	<b>102 Orang</b>	

Sumber: Data KP. Rutan-Mei 2007

## 2.2. Sejarah Rutan Klas I Jakarta Pusat

Rutan mempunyai tugas untuk perawatan, bimbingan dan pembinaan terhadap tersangka atau terdakwa dan narapidana sesuai dengan peraturan atau perundang-undangan yang berlaku. Berkaitan dengan hal tersebut maka Rutan menyelenggarakan tugas sebagai berikut :

- A. Melakukan pelayanan tahanan.
- B. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Rumah Tahanan Negara.
- C. Melakukan pengelolaan Rumah Tahanan Negara.
- D. Melakukan urusan tata usaha.

Rutan secara garis besar dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) kelas, yaitu Rutan Klas I (berada di Ibukota Propinsi), Rutan Klas IIA (berada di Kota), Rutan Klas IIB (berada di Kabupaten). Sebagaimana telah disebutkan diatas, maka Rutan Jakarta Pusat tergolong dalam klasifikasi Rutan Klas I.

Rutan Klas I Jakarta Pusat, pada tahun 1918 dibangun di atas sebidang tanah seluas 42.132m<sup>2</sup> (pada waktu itu namanya Lembaga Pemasyarakatan Salemba). Sebelum tahun 1945, Lembaga Pemasyarakatan Salemba dipergunakan oleh Kolonial Belanda untuk menahan orang-orang yang melakukan pelanggaran hukum Kolonial Belanda. Setelah tahun 1945 dengan kemerdekaan bangsa Indonesia, pada waktu itu Lembaga Pemasyarakatan digunakan untuk menampung atau menahan tahanan politik, tahanan sipil, tahanan kejaksaan, dan pelaku kejahatan ekonomi. Pada saat terjadinya pemberontakan G 30 S/PKI, sebagian tahanan atau narapidana dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan Cipinang, dan sebagian lagi ke Lembaga Pemasyarakatan Glodok (sekarang pusat elektronik glodok) dan sebagian lagi dipindahkan ke Kampus AKIP (Akademi Ilmu Pemasyarakatan) di Jl. Percetakan Negara, sekarang adalah kampus Akademi Letigasi Republik Indonesia (ALTRI). Pada tahun 1960 sampai tahun 1980 Lembaga Pemasyarakatan Salemba dijadikan Rumah Tahanan Militer (RTM) yang khusus menahan tahanan militer di bawah pimpinan Inrehab Laksusda Jaya.

Kemudian pada tanggal 4 Februari 1980 Lembaga Pemasyarakatan Salemba , perlengkapan inventaris, serta rumah dinas yang dipergunakan oleh Inrehab Laksusda Jaya diserahkan kembali kepada Departemen Kehakiman melalui Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan IV Jakarta Raya dan Kalimantan Barat, yang saat itu dikepalai oleh **Soekirman, SH**. Serah terima ini dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Panglima Komando Operasi

Pemulihan Kesatuan dan Ketertiban tanggal 9 bulan Januari tahun 1980, Nomor: Sprint-12/KepKam/I/1980 dan Surat Perintah Pelaksanaan Nomor: Sprint-45/KAHDA/I/1980 tanggal 23 Januari 1980.

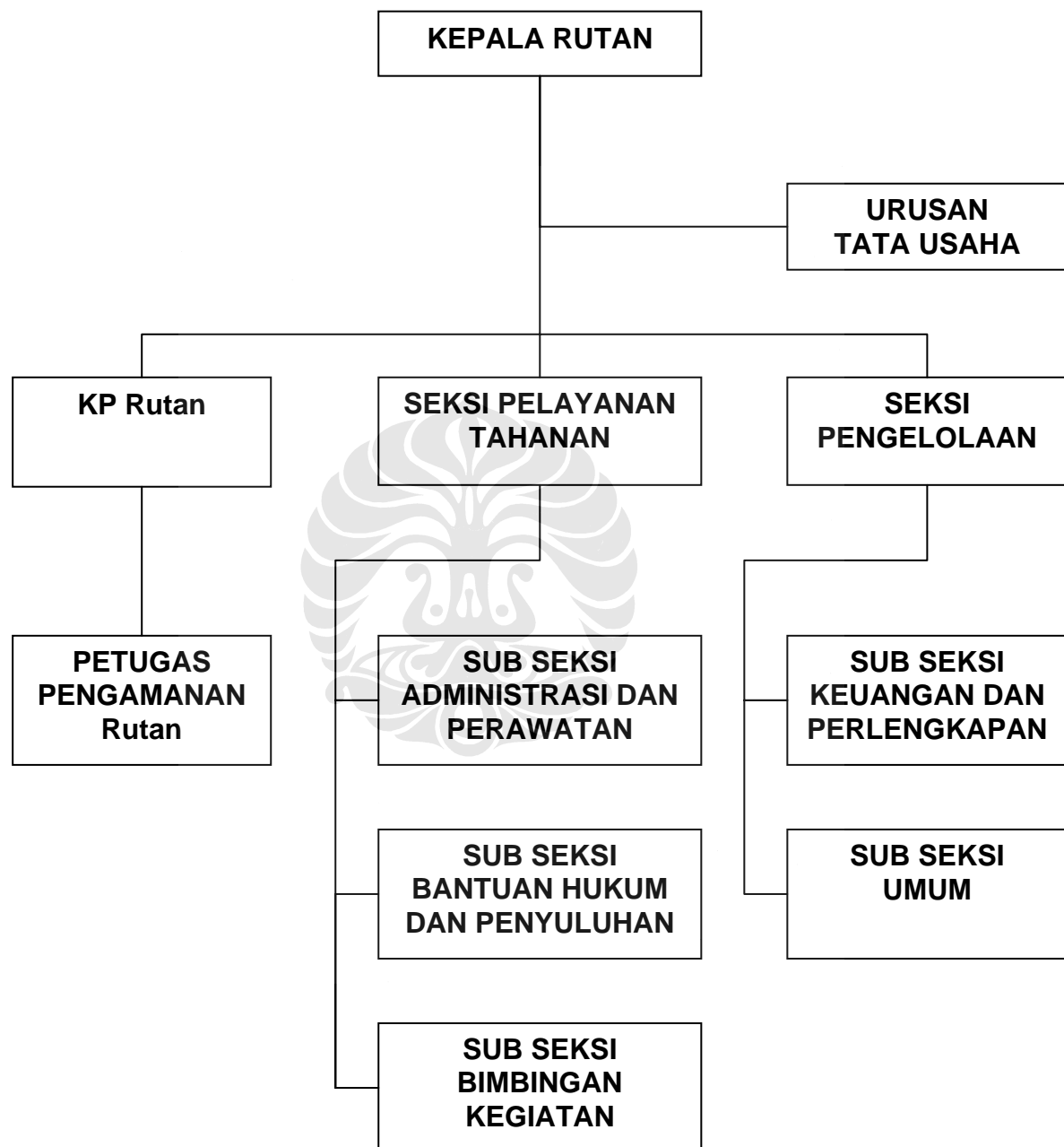
Sejak tanggal 22 bulan April tahun 1981 Lembaga Pemasyarakatan Salemba dimanfaatkan untuk pelaksanaan penahanan bagi tahanan wanita pindahan Lembaga Pemasyarakatan Bukit Duri yang pada waktu itu dialihfungsikan menjadi lokasi pertokoan dan setelah diadakan renovasi bangunan tahap I (pertama) awal Oktober 1989, mulai ditempatkan tahanan pria dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Kejaksaan Jakarta Pusat dan Kejaksaan Jakarta Utara dan Kejaksaan Jakarta Barat. Dengan semakin padatnya penghuni Lembaga Pemasyarakatan Salemba, tahanan wanita yang sejak April 1981 menempati Blok A dan Blok B dengan persetujuan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman DKI Jakarta, dipindahkan ke Rumah Tahanan Negara Klas IIA Pondok Bambu Jakarta Timur.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.04.UM.01.06 tahun 1983 tentang Penetapan Lembaga Pemasyarakatan tertentu sebagai Rumah Tahanan Negara, maka Lembaga Pemasyarakatan Salemba bersama 24 Lembaga Pemasyarakatan lainnya yang berada di seluruh Indonesia yang mewakili 18 kantor Wilayah Departemen Kehakiman (DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sumatera Barat, Riau, Sumatera Selatan, Bengkulu, Jambi, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Bali, NTT, NTB, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Timor-timur, Maluku, dan Irian Jaya berubah status menjadi Rumah Tahanan Negara.

### **2.3. Struktur Organisasi**

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.04.PR07.03 tahun 1985 tanggal 20 September 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rutan dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, maka Rutan Klas I Jakarta Pusat dipimpin oleh seorang Kepala Rutan dengan eselon III/b, yang kemudian dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dibantu oleh beberapa pejabat struktural sebagaimana tergambar dalam skema struktur organisasi Rutan berikut ini :

**Gambar 7:**  
**STRUKTUR ORGANISASI**  
**RUMAH TAHANAN KLAS I JAKARTA PUSAT**



Jika dilihat dari struktur organisasi Rutan Klas I Jakarta Pusat yang tertera diatas, maka Kepala Rutan membawahi beberapa departemen yang terdiri dari:



**A. Urusan Tata Usaha.**

Departemen ini bertugas untuk melakukan urusan surat menyurat dan kearsipan Rutan.

**B. Kesatuan Pengamanan (KP) Rutan.**

Kesatuan Pengamanan (KP) Rutan bertugas memelihara keamanan dan ketertiban di lingkungan Rutan, termasuk melakukan administrasi keamanan dan ketertiban. KP Rutan juga memiliki tugas untuk menjaga dan mengawasi seluruh tahanan dan narapidana, kemudian menerima, menempatkan dan mengeluarkan tahanan dan narapidana serta memonitor keamanan dan tata tertib yang diberlakukan untuk tahanan dan narapidana juga membuat laporan dan berita acara pelaksanaan pengamanan dan ketertiban.

KP Rutan dipimpin oleh seorang Kepala dan membawahi petugas pengamanan Rutan yang terbagi dalam 4 (empat) regu dengan kekuatan masing-masing regu sebanyak 30 (tiga puluh) orang. Keempat regu dari petugas pengamanan Rutan Klas I Jakarta Pusat tersebut yaitu :

1. Petugas pengamanan PORTIR, di mana mereka bertugas untuk menjaga keluar masuknya pengunjung atau orang luar kedalam lingkungan Rutan melalui pintu masuk utama.
2. Petugas pengamanan I (KAM-I), yang mempunyai tugas utama untuk menjaga keamanan ketertiban kunjungan keluarga tahanan dan narapidana, melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap tahanan yang akan dan pulang sidang serta mengawal tiap tahanan dan narapidana yang sakit dan akan dikirim ke Rumah Sakit.
3. Petugas pengamanan II (KAM-II), yang bertugas untuk mengatur penempatan seluruh penghuni Rutan dan menjaga keamanan di dalam lingkungan Rutan.
4. Petugas Regu Jaga, di mana tugas utamanya adalah menjaga keseluruhan lingkungan Rutan, memelihara dan menjaga keutuhan barang dan bangunan yang ada di dalam Rutan.

**C. Seksi Pelayanan Tahanan.**

Seksi ini secara fungsional bertugas untuk melaksanakan sebagai berikut :

1. Melakukan administrasi, membuat statistik dan dokumentasi tahanan serta memberikan perawatan dan pemeliharaan kesehatan seluruh tahanan dan narapidana.
2. Merancang dan memberikan kegiatan yang berguna bagi tahanan dan narapidana.
3. Siap memberikan bantuan hukum dan penyuluhan bagi tahanan dan narapidana.

Seksi Pelayanan Tahanan membawahi 3 (tiga) Sub Seksi, yaitu :

1. Sub Seksi Administrasi dan Perawatan, yang mempunyai tugas untuk melakukan pencatatan terhadap tahanan yang baru masuk serta barang-barang bawaannya, membuat statistik dan dokumentasi serta memberikan perawatan dan mengurus kesehatan tahanan dan narapidana.
2. Sub Seksi Bantuan Hukum dan Penyuluhan, yang bertugas mempersiapkan pemberian bantuan hukum atau kesempatan untuk mendapat bantuan hukum dan penasehat hukum, memberikan penyuluhan rohani dan jasmani serta mempersiapkan bahan bacaan bagi tahanan.
3. Sub Seksi Bimbingan Kegiatan yang mempunyai tugas memberikan bimbingan kegiatan bagi tahanan dan narapidana.

#### **D. Seksi Pengelolaan Rutan.**

Seksi Pengelolaan Rutan mempunyai tugas melakukan pengurusan keuangan, perlengkapan, dan Rumah Tangga Rutan dan dalam pelaksanaan tugas tersebut, seksi ini mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Melakukan urusan keuangan dan perlengkapan
2. Melakukan urusan Rumah Tangga dan Kepegawaian

Seksi Pengelolaan membawahi 2 (dua) Sub Seksi yang terdiri dari:

1. Sub Seksi Keuangan dan Perlengkapan yang bertugas melakukan pengelolaan keuangan serta perlengkapan Rumah Tahanan Negara.
2. Sub Seksi Umum yang bertugas melakukan urusan rumah tangga dan kepegawaian.

## **2.4. Keadaan Sumber Daya Manusia (SDM)**

Pegawai atau yang sering disebut juga Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu elemen penting dalam organisasi Rutan dalam mewujudkan pelaksanaan tugas perawatan, bimbingan, pembinaan terhadap tahanan dan narapidana. Ketersediaan pegawai yang profesional, memiliki integritas yang baik terhadap pekerjaan akan dapat mencapai target kerja secara optimal, namun jika ketersediaan SDM tersebut jumlahnya tidak cukup dalam pelaksanaan kerja, maka pelaksanaan tugas-tugas tersebut tidak akan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Menghadapi membengkaknya jumlah penghuni yang berjumlah 2825 Tahanan/Narapidana (Tabel 1-4), SDM yang ada (248 petugas, Tabel 5) sebenarnya diperuntukkan bagi kondisi ideal yaitu 862 Tahanan/Narapidana. Lingkungan kerja Rutan Klas 1 Jakarta Pusat tetap dapat berjalan sesuai relnya, terlihat dari suasana kerja yang tertib, lancar, aman, dan disiplin dari setiap pelaksanaan kerja baik bidang atau bagian yang ada. Setiap departemen yang terdapat pada Rutan Klas 1 Jakarta Pusat dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya, sesuai dengan struktur tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.04.PR07.03 tahun 1985 tanggal 20 September 1985, tentang Organisasi dan Tata Kerja Rutan dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara. Khususnya dalam bidang keamanan, terlihat pada intensitas dan jenis kasus gangguan keamanan yang terjadi, tergolong hal yang umum terjadi dalam pemenjaraan. Sebagai perbandingan, diambil Lapas Cipinang, dengan pertimbangan antara lain: (1) Lapas cenderung memiliki fasilitas yang lebih dibanding Rutan, (2) Jumlah pegawai yang hampir 2 kali lebih banyak yaitu 435 orang (thn 2007) (3) Jumlah Tahanan/Narapidana yang hampir sama yaitu 3114 orang. Pada tanggal 31 Juli 2007, terjadi kerusuhan massal di Lapas Cipinang yang menewaskan 2 orang Tahanan/Narapidana. Dari hal-hal diatas, maka dengan kondisi Sumber Daya Manusia yang ada, kinerja Rutan Klas I Jakarta Pusat masih dapat dikatakan baik.

Selanjutnya jumlah keseluruhan pegawai yang pada kenyataannya terjadi perubahan jumlah pada waktu tertentu, di mana sebagian diantaranya memasuki masa pensiun, dipindah tugaskan ke UPT yang lain, maupun masuknya pegawai baru. Jumlah pegawai Rutan Klas I Jakarta Pusat dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 8**  
**Keadaan Jumlah Pegawai Rutan Klas 1 Jakarta Pusat**  
**Tanggal 12 Maret 2007**

NO	BAGIAN / SUB SIE	JUMLAH	KETERANGAN
1	Pejabat Struktural	9 Orang	
2	Seksi Keamanan dengan rincian sebagai berikut : Regu I Regu II Regu III Regu IV Portier Staf Kesatuan Pengamanan	24 Orang 24 Orang 23 Orang 24 Orang 12 Orang 58 Orang	2 orang magang 1 orang magang 2 orang magang 4 orang magang 3 orang ditahan 1 orang magang
3	Staf Sub Sie Umum	20 Orang	2 orang tugas belajar AKIP
4	Staf Urusan Tata Usaha	4 Orang	
5	Staf Sub Sie BHPT	8 Orang	
6	Staf Sub Sie Keuangan & Perlengkapan	10 Orang	1 orang magang
7	Staf Sub Sie Administrasi & Perawatan	40 Orang	1 orang ditahan
8	Staf Sub Sie Bimbingan & Kegiatan	3 Orang	
<b>Jumlah</b>		<b>248 Orang</b>	

Sumber: Sub Bagian Kepegawaian Rumah Tahanan Negara Klas I Jakarta Pusat, Maret 2007

**Tabel 9**  
**Keadaan Jumlah Pegawai Rutan Klas 1 Jakarta Pusat**  
**Berdasarkan Tingkat Pendidikan**  
**Tanggal 12 Maret 2007**


NO	JENIS KELAMIN		KETERANGAN
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
	<b>201 Orang</b>	<b>47 Orang</b>	<b>Total 248 Orang</b>

Sumber: Sub Bagian Kepegawaian Rumah Tahanan Negara Klas I Jakarta Pusat, Maret 2007

**Tabel 10**  
**Keadaan Jumlah Pegawai Rutan Klas 1 Jakarta Pusat**  
**Berdasarkan Usia**  
**Tanggal 12 Maret 2007**

NO	UMUR	JUMLAH	KETERANGAN
1	Umur 20-30 Tahun	43 Orang	-
2	Umur 31-40 Tahun	60 Orang	-
3	Umur 41-50 Tahun	103 Orang	-
4	Umur 51-55 Tahun	42 Orang	-
<b>Jumlah</b>		<b>248 Orang</b>	

Sumber: Sub Bagian Kepegawaian Rumah Tahanan Negara Klas I Jakarta Pusat, Maret 2007



**Tabel 11**  
**Keadaan Jumlah Pegawai Rutan Klas 1 Jakarta Pusat**  
**Berdasarkan Tingkat Pendidikan**  
**Tanggal 12 Maret 2007**

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	SD	3 Orang	-
2	SLTP	8 Orang	-
3	SLTA	165 Orang	-
4	Sarjana Muda	9 Orang	-
5	S1	57 Orang	-
6	S2	6 Orang	-
<b>Jumlah</b>		<b>248 Orang</b>	

Sumber: Sub Bagian Kepegawaian Rumah Tahanan Negara Klas I Jakarta Pusat, Maret 2007

**Tabel 12**  
**Keadaan Jumlah Pegawai Rutan Klas 1 Jakarta Pusat**  
**Berdasarkan Golongan Kepangkatan**

**Tanggal 12 Maret 2007**

NO	PANGKAT / GOLONGAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	II	1 Orang	-
2	III	162 Orang	-
3	IV	85 Orang	-
	<b>Jumlah</b>	<b>248 Orang</b>	

Sumber: Sub Bagian Kepegawaian Rumah Tahanan Negara Klas I Jakarta Pusat, Maret 2007

## 2.5. Keadaan Penghuni

Penghuni Rutan Klas I Jakarta Pusat terdiri dari tahanan dan narapidana, berasal dari berbagai daerah yang ada di Indonesia dan warga negara asing. Setiap harinya terjadi perubahan isi penghuni Rutan Klas I Jakarta Pusat (bertambah dan berkurang). Perubahan isi ini disebabkan antara lain:

- A. Pemindahan tahanan atau narapidana ke LAPAS atau Rutan lain
- B. Penangguhan penahanan
- C. Pengalihan jenis tahanan
- D. Menjalankan program pembinaan berupa Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Menjelang Bebas (CMB), Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK), Asimilasi ke Lembaga Pemasarakatan Terbuka, dll
- E. Bebas demi hukum
- F. Bebas murni

Tingkat pemeriksaan perkara tahanan terdiri dari 5 (lima) kategori, yaitu:

### A. Penyidikan

Tingkat pemeriksaan perkara berada di bawah wewenang Kepolisian sebagai penyidik. Semua data tahanan di tingkat penyidikan (penahanan, perpanjangan dan pelimpahan) disimpan dalam Register A1.

### B. Penuntutan

Tingkat pemeriksaan perkara sudah dilimpahkan oleh Kepolisian atau Penyidik kepada Kejaksaan atau Penuntut Umum untuk dilakukan penuntutan. Semua data tahanan di tingkat penuntutan (penahanan, perpanjangan, dan pelimpahan) disimpan dalam Register A2.

### C. Peradilan Awal

Tingkat pemeriksaan perkara sudah dilimpahkan Kejaksaan atau Penuntut Umum kepada Pengadilan Negeri untuk diputuskan. Semua data tahanan di tingkat peradilan awal (penahanan, perpanjangan, putusan, dan pelimpahan) disimpan dalam Register A3. Setelah tahanan menerima hasil putusan Pengadilan Negeri, tahanan diberi waktu selama satu minggu untuk memikirkan apakah akan menerima putusan Pengadilan Negeri, maka Penuntut Umum akan membuat Berita Acara Pelaksanaan Putusan untuk kemudian dilakukan pelimpahan dan pendaftaran ke Register B (data tahanan yang berstatus menjadi narapidana). Namun jika tidak, maka tahanan berhak mengajukan banding.

#### **D. Banding**

Jika surat permohonan banding disetujui, maka tingkat pemeriksaan perkara dilimpahkan Pengadilan Negeri kepada Pengadilan Tinggi untuk sidang berkas. Semua data tahanan di tingkat banding (surat permohonan, penahanan, perpanjangan, putusan, dan pelimpahan) disimpan dalam Register A4. Setelah tahanan menerima hasil putusan Pengadilan Tinggi, tahanan diberi waktu dua minggu atau empat belas hari untuk memikirkan apakah akan menerima hasil putusan tersebut atau tidak. Jika tahanan menerima putusan Pengadilan Tinggi, maka Penuntut Umum akan membuat Berita Acara Pelaksanaan Putusan untuk kemudian dilakukan pelimpahan dan pendaftaran tahanan ke Register B (data tahanan yang berubah status menjadi narapidana). Namun jika tidak, maka tahanan berhak mengajukan kasasi.

#### **E. Kasasi**

Kasasi adalah tingkat pemeriksaan terakhir. Jika surat permohonan kasasi disetujui, maka tingkat pemeriksaan perkara akan dilimpahkan Pengadilan Tinggi kepada Mahkamah Agung untuk sidang berkas. Semua data tahanan di tingkat Kasasi (surat permohonan, penahanan, perpanjangan, putusan, dan pelimpahan) disimpan dalam Register A5, setelah tahanan menerima hasil putusan Mahkamah Agung, maka Penuntut Umum akan membuat Berita Acara Pelaksanaan Putusan untuk kemudian dilakukan pelimpahan dan pendaftaran tahanan ke Register B (data tahanan yang berubah status menjadi narapidana).

Untuk tahanan yang telah berubah status menjadi narapidana berhak tinggal di Rumah Tahanan Negara jika lama pidananya kurang dari satu tahun dan enam bulan, jika lebih dari itu maka narapidana tersebut harus dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan lain untuk mendapatkan proses pembinaan lanjutan. Narapidana yang berada dalam Rumah Tahanan Negara dapat digolongkan sesuai dengan lama dan jenis pidananya yaitu:

1. **BI**, yaitu narapidana yang dipidana diatas satu tahun
2. **BIIa**, yaitu narapidana yang dipidana tiga bulan satu hari sampai dengan satu tahun
3. **BIIb**, yaitu narapidana yang dipidana tiga bulan kebawah
4. **BIIs**, yaitu narapidana yang menjalani pidana kurungan sebagai pengganti denda

**Tabel 13**  
**Data Penghuni Rutan Klas 1 Jakarta Pusat**  
**Tanggal 12 Maret 2007**

NO	ISI	JUMLAH
1	<b>Tahanan</b>	
	A I	3 Orang
	A II	1473 Orang
	A III	1059 Orang
	A IV	88 Orang
	A V	24 Orang
	<b>Jumlah</b>	<b>2647 Orang</b>
2	<b>Narapidana</b>	
	BI	397 Orang
	BIIa	284 Orang
	BIIb	0 Orang
	BIIs	25 Orang
	<b>Jumlah</b>	<b>706 Orang</b>
<b>Jumlah Keseluruhan</b>		<b>3353 Orang</b>

Sumber: Laporan Bulanan Sub Seksi Administrasi dan Perawatan bulan Maret 2007



Berdasarkan data di atas, maka total jumlah penghuni Rutan Klas I Jakarta Pusat pada bulan Maret tahun dua ribu tujuh adalah sebanyak 3353 orang (terdiri dari 2647 Tahanan dan 706 narapidana). Dengan demikian jumlah ini telah melebihi kapasitas isi blok yang ada yakni 1.000 orang. Overkapasitas yang terjadi ini diharapkan dapat ditanggulangi dengan adanya pembangunan blok hunian baru di Rutan Klas I Jakarta Pusat yang dibuat bertingkat dan adanya pemindahan narapidana ke Lembaga Pemasyarakatan yang lain seperti ke Tangerang, Nusa Kambangan, Cirebon, Serang, Subang, dan lain-lain. Data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

**Tabel 14**  
**Data Pemindahan Narapidana dari Rutan Klas I Jakarta Pusat**  
**Periode Tahun 2006 - 2007**

<b>NO</b>	<b>BULAN</b>	<b>JUMLAH</b>
01	Januari 2006	70 Orang
02	Februari 2006	310 Orang
03	Maret 2006	341 Orang
04	April 2006	275 Orang
05	Mei 2006	240 Orang
06	Juni 2006	102 Orang
07	Juli 2006	245 Orang
08	Agustus 2006	185 Orang
09	September 2006	364 Orang
10	Oktober 2006	181 Orang
11	November 2006	303 Orang
12	Desember 2006	198 Orang
13	Januari 2007	220 Orang
14	Februari 2007	158 Orang
15	Maret 2007	154 Orang
16	April 2007	150 Orang

Sumber: Seksi Pelayanan Tahanan; Rekapitulasi Pemindahan Narapidana-Mei 2007

## 2.6. Sarana Perawatan dan Pembinaan

Rutan Klas I Jakarta Pusat sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis di jajaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mempunyai fungsi sebagai tempat perawatan tahanan dan pembinaan narapidana memiliki sarana dan prasarana perawatan tahanan dan pembinaan narapidana, yaitu sebagai berikut:

### A. Gedung Perkantoran

Saat ini gedung baru Rutan Klas I Jakarta Pusat sudah dioperasionalkan, sementara pembangunan gedung baru tahap kedua sedang dalam proses persiapan pembangunan. Pembangunan ini dilaksanakan mengingat gedung lama sudah kurang layak huni dan dari segi pengamanannya sudah kurang nyaman dan sulit dikontrol karena sudah banyak bagian-bagian yang potensial untuk gangguan keamanan.

### B. Poliklinik

Poliklinik yang diperuntukkan bagi penghuni tersedia di dalam Rutan dan pelayanan medisnya adalah layanan rawat jalan dan rawat inap. Namun fasilitas yang tersedia masih terbatas sehingga jika ada warga binaan yang mengalami suatu penyakit yang lebih parah, maka akan dirujuk ke Rumah Sakit rujukan yang memiliki layanan medis yang lebih lengkap.

### C. Sarana Peribadatan

Sarana peribadatan yang tersedia di Rutan Klas I Jakarta Pusat saat ini adalah Masjid, Gereja serta Vihara, dan dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan keagamaan.

### D. Sarana Olahraga

Rutan Klas I Jakarta Pusat menyediakan sarana olahraga lapangan sepakbola mini, lapangan bola *volley*, lapangan bulu tangkis, lapangan tenis meja untuk penyaluran kegiatan berolahraga. Khusus untuk lapangan tenis meja hampir ada di setiap blok, sehingga mereka dapat melakukan kegiatan olahraga untuk menunjang kesehatan mereka.

### E. Sarana Kegiatan Kerja

Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa penghuni Rutan Klas I Jakarta Pusat terdiri dari tahanan dan narapidana, maka bagi tahanan di mana belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan menganut azas praduga tak bersalah maka tidak diwajibkan bekerja. Sedangkan narapidana yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap

berkewajiban untuk mengikuti program pembinaan yang dilaksanakan pihak Rutan Klas I Jakarta Pusat. Pembinaan yang dilaksanakan antara lain pembinaan keterampilan kerja berupa jahit menjahit, potong rambut, membuat pot dari kayu serta kerajinan tangan lainnya.

Namun semuanya itu tidak dilakukan secara maksimal oleh pihak Rutan Klas I Jakarta Pusat karena keterbatasan sarana dan prasarana, juga tenaga pengajar sehingga pembinaan tersebut hanya sebatas pengisi waktu bagi warga binaan sambil menunggu mereka dipindahkan ke LAPAS lain. Kegiatan lainnya yang dilakukan warga binaan adalah melalui penyuluhan bantuan hukum, di mana mereka mendapatkan pengarahan hukum selama di dalam Rutan Klas I Jakarta Pusat, kegiatan bantuan hukum berupa bimbingan rohani bagi tahanan baru, penyuluhan hukum dari kantor wilayah, penyuluhan kesehatan, serta penyuluhan lainnya yang berkaitan dengan kehidupan tahanan dan narapidana selama berada dalam Rutan Klas I Jakarta Pusat.

#### **F. Blok**

Blok adalah salah satu sarana di mana semua tahanan dan narapidana tinggal menjalani pidananya dan menunggu proses persidangan berjalan. Blok berupa ruangan-ruangan yang bertingkat dan berbentuk *maximum security*. Kamar yang dihuni oleh warga binaan wajib tinggal di sana mulai jam 18.00 sampai dengan 06.00, kecuali mereka yang menjadi tamping (pembantu petugas) dan perangkat blok seperti *voorman*, juru kunci dan juru tulis.

### **2.7. Dasar Peraturan Tindakan Pengamanan**

Divisi keamanan Rutan Klas 1 Jakarta pusat dalam pelaksanaan pengamanan, khususnya dalam menanggulangi tindak kekerasan sebagai salah satu gangguan keamanan dan ketertiban secara umum, mendasari tindakannya pada **Petunjuk Pelaksanaan** dan **Petunjuk Teknis Perawatan Rumah Tahanan Negara** yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, yaitu :

- A.** Langkah-langkah pengamanan atas prinsip mencegah (preventif) lebih baik dari pada penindakan (represif).
- B.** Mencegah sesuatu hal yang tidak diinginkan yaitu dengan bersikap waspada dan disiplin.

1. Mencegah meluasnya keriuhan dengan cara:
2. Memberi tanda bahaya agar komandan jaga dan pos-pos lainnya mengetahuinya dan siap siaga.
3. Mengadakan usaha-usaha pembatasan kejadian (lokalisir)
4. Setiap petugas yang mendengar isyarat tanda bahaya tersebut wajib meneruskannya.
5. Langkah-langkah lebih jauh adalah:
  - a. Memberi isyarat tanda bahaya.
  - b. Memberi perintah untuk menghentikan keriuhan.
  - c. Jika tidak diindahkan memberikan tembakan peringatan keatas sebanyak tiga kali.
  - d. Jika tidak diindahkan juga langsung menembak kakinya.
6. Jika segala upaya tersebut diatas tidak membuahkan hasil dan pelaku keriuhan malah membahayakan petugas maka boleh menembak langsung.
7. Apabila cara tersebut diatas tidak dapat menghentikan keriuhan yang terjadi maka komandan jaga dapat meminta bantuan kepolisian dalam penanggulangannya.

Selain pada Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Perawatan Rumah Tahanan Negara, sistem pengamanan yang dilakukan para Petugas Keamanan mengacu pada Protap penanggulangan gangguan keamanan dan ketertiban dalam lingkungan LAPAS dan Rutan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM RI sebagai acuan secara Nasional (Protap, Prosedur Pelaksanaan Tugas pada Rutan dan LAPAS, Dirjen Pemasyarakatan, 2004, Jakarta), dengan uraian sebagai berikut:

#### **A. Dasar**

1. Undang Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHAP.
2. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
3. Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-syarat dan Tatacara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan.
6. Permenkeh RI Nomor M.04.UM.01.06 tahun 1983 tanggal 29 Desember 1983 tentang Tata Cara Penempatan, Perawatan dan Tata Tertib Rumah Tahanan Negara.

7. Kepmenkeh RI Nomor M.04-PK.07.03 tahun 1985 tanggal 20 September 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara.
8. Kepmenkeh RI Nomor M.02-PK.04.10 tahun 1990 tanggal 10 April 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana dan Tahanan.
9. Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Nomor: E.76-UM.01.06 tahun 1986, tanggal 17 Februari 1986 tentang Perawatan Tahanan Rumah Tahanan Negara.
10. Surat Keputusan Dirjen Bina Tuna Warga Nomor: DP.33/18/14 tanggal 31 Desember 1974 tentang PPLP.

## **B. Umum**

Dalam upaya menciptakan kondisi Rutan yang aman dan tertib, langkah pengamanan dilakukan berdasarkan atas prinsip mencegah adalah lebih baik daripada menindak, petugas pengamanan sedini mungkin mendeteksi setiap gejala yang menjadi penyebab terjadinya gangguan kamtib, dan dalam setiap upaya menanggulangi gangguan keamanan dan ketertiban di Rutan (sekecil apapun), setiap petugas pengamanan harus selalu memahami dan memperhatikan petunjuk langkah-langkah pengamanan sesuai dengan jenis gangguan kamtib yang terjadi. Jenis gangguan kamtib di Rutan meliputi:

1. Pencurian, pemerasan, dan pengancaman.
2. Perkelahian antar tahanan (di dalam atau di luar kamar).
3. Pemberontakan dan perlawanan terhadap petugas.
4. Kebakaran
5. Unjuk rasa dan mogok makan.
6. Pelarian perorangan maupun massal.
7. Bencana alam (banjir, gempa bumi, angin topan, dll)
8. Penyerangan dari luar Rutan.
9. Lain-lain gangguan keamanan dan ketertiban.

Laporan Karupam kepada kepala KPR hanya dilakukan pada saat jam kerja, sedangkan pada waktu di luar jam kerja/hari libur Karupam melaporkan kepada Piket. Apabila keadaan gangguan kamtib tidak dapat dikendalikan, segera meminta bantuan Polisi atau aparat terkait lainnya.

Upaya penanggulangan gangguan keamanan seperti kerusuhan perkelahian, kekerasan, pemberontakan, perlawanan, pembakaran dan lain-lain pada Rutan Klas I Jakarta pusat menggunakan Strategi Penanggulangan Gangguan Keamanan berdasarkan Kepmenkeh R.I Nomor: M-02.PR.08.10 Tahun 1983 tentang Pola pembinaan keamanan dan ketertiban bab IV huruf I butir (9) dan huruf K butir (4) dan Kepmenkeh R.I Nomor: M.07-PL.03.05 Tahun 1987 tentang Tata cara penggunaan dan pemeliharaan senjata api pada pasal 11 ayat (2),(3),(4) serta Peraturan Penjagaan Lembaga Pemasyarakatan (PPLP) di mana semua dilakukan dengan tahapan-tahapan disesuaikan dari berat ringannya gangguan keamanan tersebut. Upaya pengamanan pada dasarnya menitik beratkan pada prinsip mencegah (preventif termasuk persuasif) dari pada upaya penindakan (represif), yaitu dengan mengedepankan sikap waspada dan disiplin dari dalam diri setiap petugas dari pada dengan upaya pemaksaan/kekerasan dan penggunaan senjata api. Adapun langkah-langkah pengamanan tersebut dilakukan dengan cara :

1. Memberikan isyarat tanda bahaya (membunyikan peluit, memukul lonceng, atau lainnya).
2. Mengadakan usaha-usaha pembatasan lingkungan kejadian (relokasi/evakuasi).
3. Setiap petugas yang mendengar tanda bahaya wajib meneruskan tanda bahaya tersebut.
4. Langkah – langkah selanjutnya yaitu:
  - a. Memberi perintah untuk menghentikan kericuhan
  - b. Mengamankan tempat kejadian
  - c. Dalam hal tertangkap tangan atau tertangkap basah, kemudian menangkapnya dan lalu memborgolnya.
  - d. Menolong korban.
  - e. Hal-hal lain yang dipandang perlu berlandaskan peraturan perundangan yang berlaku.

Pelaksanaan tugas pengamanan harus pula didukung dengan unsur fasilitas yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana dalam bentuk fisik sebagaimana kajian yang dilakukan oleh Tim Subdit Pengembangan Teknologi, Direktorat Keamanan dan Ketertiban Direktorat Jenderal Pemasyarakatan tahun 2003 merumuskan bahwa sarana pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan meliputi:

- a. Kondisi bangunan dan gedung yang dikelilingi pagar tembok lapis tiga (Ring 1, Ring 2, dan Ring 3)

- b. Senjata api dan amunisi sesuai dengan standar baku Masyarakatan yang diterapkan oleh PT. Pindad (Persero) yang dilengkapi gedung dan almari penyimpanannya. Senjata api dan amunisi sebagai sarana perlengkapan keamanan dan mengantisipasi terjadinya gangguan keamanan, apabila dalam keadaan terdesak, baik senjata laras panjang maupun senjata genggam. Pada ruang komandan jaga harus tersedia laras panjang beserta amunisinya.
- c. Perlengkapan keamanan seperti: borgol, metal detector, tongkat listrik, alarm, handy talky, rompi, tameng, helm pengaman, gas air mata, lampu roemergency, lampu sorot pos atas, kunci / gembok standar viro, alat pemadam kebakaran, control lock dan sebagainya.
- d. Memfungsikan pos-pos pengamanan strategis secara optimal. Pos-pos jaga yang berada di blok hunian harus senantiasa terisi oleh petugas jaga.
- e. Menerapkan lokasi steril dari lalu lintas penghuni Lembaga Masyarakatan secara maksimal. Penghuni dilarang berada di Ring 1 dan Ring 2 kecuali seijin petugas.
- f. Kartu identitas diberikan kepada pengunjung, tamu dinas, wartawan, mahasiswa / pelajar yang sedang melakukan penelitian atau PKL, tamping, tugas kebersihan dan lain-lain. Setiap orang yang akan memasuki Lembaga Masyarakatan harus bisa menunjukkan kartu identitas agar tidak terjadi kesalahan dalam melakukan pengeluaran orang dari dalam Lembaga Masyarakatan.
- g. Pemisahan ruang kantor, ruang kunjungan, ruang pengacara, ruang ketrampilan, ruang pembinaan dan blok hunian secara signifikan. Hal ini dilakukan dalam rangka memudahkan petugas dalam pengawasan terhadap pengunjung dan penghuni.

Adapun dalam hal kejadian gangguan keamanan yang memang sangat membahayakan dan harus diatasi dengan penggunaan senjata api, maka penggunaan senjata api dilakukan melalui beberapa tahapan dan kriteria, yaitu :

- a. Sebelum menembakkan senjata api harus terlebih dahulu memberikan peringatan secara tegas dan beribawa.
- b. Apabila peringatan sebagaimana diatas tidak dipatuhi maka diberi peringatan tembakan keatas sebanyak tiga kali.
- c. Apabila peringatan tembakan tersebut di atas tidak di taati juga maka dilakukan penembakan langsung pada bagian badan yang tidak membahayakan jiwa, yaitu bagian kaki.
- d. Khusus untuk keadaan tertentu yaitu jika telah dilakukan segala daya dan upaya untuk mengatasi gangguan keamanan tersebut namun tidak juga mereda maka dapat menembak langsung ke pelaku.

Dari rangkaian tahapan-tahapan dari upaya untuk menanggulangi gangguan keamanan tersebut dapat terlihat jelas bahwa upaya penanggulangan tersebut masih mengedepankan Hak Asasi Manusia meskipun terhadap mereka yang berstatus tahanan maupun narapidana. Oleh

karena itu petugas pengamanan Rutan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Hanya boleh menggunakan kekerasan apabila upaya persuasif tidak berhasil dan tidak ada upaya/cara atau kesempatan lain.
- b. Memberikan jaminan perlindungan bagi mereka yang menyerah, luka, sakit, tidak berdaya serta tidak menjurus pada perbuatan yang biadab atau brutal.
- c. Diarahkan untuk memperkecil terjadinya kerusakan, luka dan hilangnya nyawa baik dari petugas, tahanan atau narapidana.

Senjata api digunakan hanya apabila benar-benar diperlukan dan untuk penegakan hukum, tujuan perlindungan dan penegakan HAM secara proporsional dengan tujuan yang sah.

### **C. PROSEDUR TETAP / STANDARD OPERATING PROCEDURE**

1. Petugas Pengamanan
  - a. Segera mengambil langkah pengamanan dengan berupaya menghentikan kejadian gangguan kamtib.
  - b. Apabila diperkirakan tidak dapat ditanggulangi, segera melaporkan kejadian tersebut kepada Karupam melalui sarana tercepat (handy talkie; sirine/alarm; lonceng).
  - c. Melokalisir kejadian agar tidak meluas ke lokasi lain.
2. Kepala Regu Pengamanan
  - a. Setelah mendapat atau mendengar isyarat tanda bahaya atau menyaksikan langsung adanya gangguan kamtib, maka segera mengambil tindakan (misalnya: membunyikan isyarat tanda bahaya), agar seluruh petugas pengamanan siap siaga dan mengamankan lokasi masing-masing.
  - b. Apabila menurut penilaian, keadaan dapat diatasi, maka tindakan yang diambil adalah sebagai berikut:
    - 1) Memberi perintah untuk menghentikan kerusuhan (gangguan kamtib lainnya).
    - 2) Apabila tidak diindahkan, melepaskan tembakan peringatan.
    - 3) Apabila juga tidak diindahkan, menembak salah seorang yang menjadi pemicu kerusuhan pada bagian tubuh yang tidak membahayakan jiwanya (terutama bagian kaki) dari tempat yang cukup aman (untuk mencegah kemungkinan direbutnya senjata api).
  - c. Apabila keadaan tidak dapat dikendalikan, segera meminta bantuan Polisi/aparat keamanan.
  - d. Apabila kerusuhan yang disertai dengan perlawanan terhadap petugas, maka tindakan atau langkah yang harus diambil adalah:
    - 1) Memperingatkan agar pelaku menghentikan tindakannya.
    - 2) Memerintahkan untuk memasukkan narapidana tersebut ke kamar tersendiri dan melaporkan tindakannya kepada Piket.
    - 3) Bila peringatan lisan tidak pula diindahkan, memberi peringatan dengan letusan senjata api tiga kali berturut-turut dan apabila tidak



juga diindahkan sedangkan perlawanan tersebut membahayakan petugas, maka menembak kaki pelaku.

- e. Apabila terjadi pemberontakan maka langkah yang diambil adalah:
  - 1) Memberikan tanda isyarat kepada seluruh petugas, baik yang sedang bertugas maupun yang bertempat tinggal di sekeliling Rutan dengan jalan membunyikan sirine atau lonceng lima kali berturut-turut secara terus menerus dan segera meminta bantuan kepada kepolisian/aparat keamanan lainnya.
  - 2) Memberikan perintah kepada seluruh pelaku untuk menghentikan pemberontakan dan kembali ke blok/kamar masing-masing serta melokalisir tempat kejadian.
  - 3) Apabila perintah tidak dilaksanakan, memberikan peringatan dengan letusan senjata api tiga kali berturut-turut dan apabila tidak diindahkan, maka menembak kaki pelaku yang diperkirakan sebagai pimpinannya.
- f. Apabila terjadi percobaan pelarian yang masih di dalam tembok, mengambil tindakan sebagai berikut:
  - 1) Memberikan tanda isyarat kepada seluruh petugas, baik yang sedang bertugas maupun yang bertempat tinggal di sekeliling Rutan dengan jalan membunyikan sirine atau lonceng lima kali berturut-turut secara terus menerus dan segera meminta bantuan kepada kepolisian/aparat keamanan lainnya.
  - 2) Memasukkan seluruh tahanan ke kamar masing-masing, untuk memudahkan upaya pencarian.
  - 3) Melokalisir tempat yang diperkirakan menjadi persembunyian dengan cara menempatkan petugas untuk mengawasi tempat-tempat yang dicurigai guna membatasi ruang gerak pelaku.
  - 4) Melakukan pencarian di tempat-tempat yang diduga menjadi tempat persembunyian.
  - 5) Jika sudah ditemukan, memerintahkan kepada pelaku agar menyerah dengan cara mengangkat tangannya dan berjalan jongkok.
  - 6) Jika pelaku tidak mau menyerah, memberikan tembakan peringatan dengan letusan senjata api tiga kali berturut-turut dan apabila tidak diindahkan maka menembak kaki pelaku.
- g. Bila terjadi kebakaran mengambil langkah sebagai berikut:
  - 1) Membunyikan isyarat tanda bahaya kebakaran untuk kesiapan siagaan dengan jalan membunyikan sirine atau lonceng tiga kali berturut-turut secara terus menerus dan meminta bantuan unit pemadam kebakaran terdekat sambil mengupayakan memadamkan kebakaran seoptimal mungkin dengan menggunakan sarana pemadam kebakaran yang tersedia.
  - 2) Meningkatkan kesiagaan di setiap pos penjagaan, untuk mencegah terjadinya kepanikan atau gangguan keamanan lainnya.
  - 3) Apabila kebakaran dapat membahayakan keselamatan, maka tahanan yang terancam diungsikan (dievakuasi) ke tempat yang lebih aman.
  - 4) Mengamankan instalasi-instalasi penting: dokumen penting dan buku-buku register, gardu listrik beserta jaringannya, gudang

- persediaan makanan, gudang barang, kendaraan, senjata dan amunisi, dan kekayaan Negara lainnya.
- h. Apabila terjadi bencana alam (banjir, gunung meletus, angin topan, dan lain lain) mengambil langkah/tindakan untuk menyelamatkan tahanan dan menjaga keutuhan serta mengamankan kekayaan Negara yang masih mungkin dapat diamankan. Sedangkan bencana alam tersebut jelas-jelas mengancam jiwa, maka seluruh tahanan dapat diungsikan atau dievakuasi ke tempat yang lebih aman, beserta dokumen-dokumen penting yang berkaitan dengan tahanan yang bersangkutan.
  - i. Apabila terjadi perkelahian perorangan di dalam kamar:
    - 1) Mengupayakan meleraikan dan menghentikan perkelahian serta memerintahkan kepada Tahanan lainnya untuk tenang.
    - 2) Bila peringatan tidak diindahkan, maka diberikan peringatan yang kedua kali dan apabila masih tidak diindahkan maka bila dipandang perlu memberikan peringatan dengan letusan senjata api ke atas disertai dengan perintah agar semua Tahanan tetap tenang di tempat masing-masing.
    - 3) Bersama-sama dengan petugas piket dan anggota regu pengamanan membuka pintu kamar serta memerintahkan narapidana/tahanan yang berkelahi keluar dari kamarnya dan memisahkan penempatannya dalam kamar tersendiri.
  - j. Apabila terjadi perkelahian perorangan di luar kamar:
    - 1) Mengupayakan meleraikan dan menghentikan perkelahian serta memerintahkan kepada Tahanan lainnya untuk masuk ke kamarnya masing-masing.
    - 2) Bila peringatan tidak diindahkan, maka diberikan peringatan yang kedua kali dan apabila masih tidak diindahkan maka bila dipandang perlu memberikan peringatan dengan letusan senjata api ke atas disertai dengan perintah agar semua Tahanan tetap tenang di tempat masing-masing.
    - 3) Bersama dengan petugas piket dan anggota regu pengamanan membawa/mengamankan para pelaku ke ruang KPR untuk pemeriksaan lebih lanjut.
  - k. Apabila terjadi perkelahian antar kelompok di dalam kamar:
    - 1) Membunyikan tanda isyarat agar setiap petugas pengamanan dalam keadaan waspada.
    - 2) Memberi peringatan secara lisan dan segera melaporkan kepada piket/KPR.
    - 3) Sambil menunggu perintah Ka. Rutan, Kepala Regu Pengamanan harus mengambil tindakan seperti point 1, tidak dibenarkan membuka pintu kamar.
  - l. Bila perkelahian merupakan pengeroyokan:
    - 1) Mengambil langkah pertama untuk menghentikan dengan perintah lisan.
    - 2) Bila tidak dileraikan dengan perintah lisan, segera memerintahkan seluruh Tahanan kamar tiarap menghadap ke dinding dan memerintahkan korban segera mendekati pintu untuk dikeluarkan.
    - 3) Melaporkan kejadian kepada petugas piket.
    - 4) Dengan dibantu oleh petugas piket dan anggota regu pengamanan, mengeluarkan korban dari kamarnya.

- 5) Apabila perintah tidak diindahkan, dapat melepaskan tembakan peringatan ke tempat-tempat yang tidak membahayakan.
- 6) Meminta bantuan aparat keamanan setempat (kepolisian).
- m. Apabila terjadi mogok makan, tindakan yang harus dilakukan:
  - 1) Memanggil pelaku dan menanyakan sebabnya.
  - 2) Membujuk agar mau menghentikan pemogokan dan berupaya untuk menyelesaikan permasalahan.
  - 3) Melaporkan kepada petugas piket.
3. Petugas Piket
 

Dalam upaya penanggulangan gangguan kamtib, petugas piket setelah menerima laporan dari Kepala Regu Pengamanan maka tindakan yang harus dilakukan adalah:

  - a. Segera melaporkan kejadian kepada Ka. Rutan dan KPR.
  - b. Bersama-sama dengan Ka. Rutan dan KPR berupaya untuk menanggulangi gangguan kamtib dengan tetap memperhatikan langkah-langkah tindakan pengamanan sesuai dengan ketentuan.
  - c. Membuat laporan kejadian secara tertulis.
4. Kepala Satuan Pengamanan
 

Segera setelah menerima laporan dari petugas piket dan perintah penanggulangan dari Ka. Rutan mengambil tindakan:

  - a. Memerintahkan kepada Kepala Regu Pengamanan untuk mengambil tindakan penanggulangan.
  - b. Dalam melakukan tindakan penanggulangan harus tetap memperhatikan langkah-langkah tindakan pengamanan.

Dalam hal terjadi gangguan kamtib yang memerlukan bantuan dari instansi terkait (Kepolisian, Pemadam Kebakaran), KPR harus mengkoordinir strategi penanggulangannya.

## BAB III

### KERANGKA TEORITIS

#### 3.1. Kekerasan

##### 3.1.1. Pengertian Kekerasan

Kekerasan merupakan terjemahan dari kata *violence* yang berkaitan erat dengan kata *vis* (daya atau kekuatan) dan *latus* yang berasal dari *ferre* (membawa) yang berarti membawa kekuatan (**Windhu, 1992**). Sedangkan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia karangan **Poerwadarminta** tahun 1982, kata kekerasan dapat diartikan sebagai “sifat atau hal yang keras; kekuatan; paksaan”. Pengertian kekerasan (*violence*) menunjuk kepada tingkah laku yang pertama-tama harus bertentangan dengan undang-undang, baik berupa ancaman saja maupun sudah merupakan suatu tindakan nyata dan memiliki akibat-akibat kerusakan terhadap harta benda atau fisik atau mengakibatkan kematian pada seseorang (**Artasasmita, 2007**).

Pendapat lain mengutarakan bahwa kekerasan adalah suatu gaya hidup, sumber-sumber kultural dari kejahatan kekerasan terletak pada berseminya sub kebudayaan kekerasan yang merupakan nilai-nilai dan norma-norma yang mendukung perilaku kekerasan (**Ronny et al, 2001**). Kemudian dikatakan bahwa kekerasan sesungguhnya merupakan pengungkapan dari kelemahan dan kebingungan. Seseorang yang lemah cenderung bertingkah laku pada kekerasan, bertindak dengan benar baginya hanya sebagai suatu kebetulan belaka. Adakah manusia yang menganut pantang kekerasan (dan jika diperluas, masyarakat yang menganut pantang kekerasan) yang senantiasa jujur dan adil. Masyarakat yang benar-benar bebas adil harus dibangun atas landasan pantang kekerasan (**Hasan et al, 1992**). Dan bila ditelaah lebih lanjut lagi, maka dapat ditemukan tiga unsur penting yang terlibat dalam setiap konteks kekerasan (**Hasan et al, 1992**) adalah sebagai berikut:

**A. Pelaku.** Masyarakat sepakat bahwa apabila pelaku kekerasan adalah olahragawan atau penegak hukum dalam menjalankan tugasnya, maka kekerasan tersebut dianggap sah dan bukan kejahatan. Tetapi bila pelakunya adalah penjahat dan melakukan kekerasan saat melakukan aksi kejahatan, maka kekerasan ini tidak sah dan dianggap sebagai kejahatan.

**B. Target/sasaran.** Jelas diterima oleh umum bahwa jika sasaran kekerasan itu adalah penjahat maka kekerasan itu bukanlah kejahatan. Namun jika kekerasan itu dilakukan terhadap orang lain yang bukan penjahat, maka kekerasan tersebut dianggap sebagai suatu kejahatan.

**C. Tujuan.** Kekerasan yang dimaksudkan untuk melumpuhkan penjahat, maka kekerasan itu bukan kejahatan, namun jika kekerasan dilakukan dalam rangka tindakan melanggar hukum, maka kekerasan ini dianggap sebagai suatu kejahatan (**Santoso, 2002**).

Kondisi membuat manusia menjadi lebih agresif ataupun sekedar untuk melindungi diri seperti yang diungkapkan Jack D. Douglas dan Frances Chaput Waksler bahwa kekerasan digunakan untuk menggambarkan perilaku baik terbuka (*overt*) maupun tertutup (*covert*) dan bersifat menyerang (*offensive*) maupun bertahan (*defensive*) yang disertai penggunaan kekuatan kepada orang lain (**Santoso, 2002**). Kekerasan adalah suatu tindakan (perbuatan) yang didasari pemaksaan kemarahan kejengkelan, frustrasi, emosi, depresi, dan lain-lain yang disebabkan faktor dalam kehidupannya baik sosial, ekonomi, psikologis, budaya dan lain sebagainya. (**Sahetapy, 2002**).

### 3.1.2. Akar Kekerasan

Manusia sebagai bagian dari makhluk hidup khususnya mamalia, secara lahiriah memiliki sifat agresif. Manusia itu agresif karena ia berpembawaan agresif dan berpembawaan agresif karena ia memang agresif, diutarakan oleh **Lorenz (Fromm, 2001)**.

Agresif berasal dari kata "agresi" merupakan dorongan adaptif secara biologis dan berkembang secara evolusioner, yang mempertahankan hidup individu dan spesies sekaligus memiliki sifat kedestruktifan dan kekejaman (**Fromm, 2001**). Agresi adalah "respon yang memberi stimuli berbahaya kepada organisme lain", diutarakan oleh **Buss (Fromm, 2001)**.

Kita harus membedakan antara, pada diri manusia, dua jenis agresi yang sangat berbeda. Yang pertama, yang juga ada pada binatang yaitu desakan untuk melawan (atau melarikan diri) yang telah terprogram secara filogenetik sewaktu kepentingan hayatinya terancam. Agresi "lunak" defensif ini dimaksudkan untuk mempertahankan hidup individu atau spesies, bersifat adaptif biologis, dan hanya muncul jika memang ada ancaman. Jenis yang lain, agresi "jahat", yakni kekejaman

dan kedestruktifan, merupakan ciri khas spesies manusia dan tidak ditemukan pada sebagian besar mamalia. Agresi ini tidak terprogram secara filogenetik dan tidak adaptif secara biologis (**Fromm, 2001**).

Buku berjudul *On Aggression* karya **Konrad Lorenz (1966)**, *African Genesis* dan *The Territorial Imperative* karya **Robert Ardrey (1961 & 1967)**, *The Naked Ape* karya **Desmond Morris (1967)** dan *On Love and Hate* karya **I. Eibl-Eibesfeldt (1972)** pada dasarnya mengandung tesis yang sama yaitu:

”Perilaku agresif manusia yang diwujudkan dalam peperangan, kejahatan, perkelahian dan segala jenis perilaku destruktif dan sadistis ditimbulkan oleh insting bawaan yang telah terprogram secara filogenetik” (**Fromm, 2001**).

Perilaku agresif manusia tersebut melahirkan tindak kekerasan dalam perwujudannya. Baik ketika ia mempertahankan hidupnya (*defensif*) maupun ketika ia melakukan agresi ”jahat”. Intensitas kedestruktifan dari dorongan agresi, yang masih merupakan kejahatan turun-temurun pada manusia, merupakan konsekuensi dari proses seleksi intra-spesifik yang terjadi pada leluhur kita sekitar empat puluh ribu tahun, yakni sepanjang Jaman Batu. Faktor yang mempengaruhi seleksi untuk masa kini adalah peperangan yang terjadi antar suku-suku yang tinggal berdekatan (**Fromm, 2001**). Peperangan disebabkan oleh kecenderungan destruktif bawaan dalam fitrah (sifat dasar) manusia. Antusiasme militan berkembang dari respon pertahanan komunal merupakan warisan leluhur pra-manusia kita, menurut **Lorenz (Fromm, 2001)**.

Di satu sisi, manusia memiliki persamaan dengan species binatang, yang mempertahankan spesiesnya. Namun di sisi lain ia adalah, di antara ribuan species yang mempertahankan diri, satu-satunya cara mempertahankan dirinya bersifat merusak. Manusia adalah satu-satunya species yang merupakan pembunuh masal, satu-satunya yang canggung di dalam masyarakatnya sendiri, diutarakan oleh **Tinbergen (Fromm, 2001)**. Agresi khas manusia yang tidak didapati pada mamalia lain adalah kecenderungan untuk membunuh dan menyiksa tanpa ”alasan” apa pun, kecuali sekadar sebagai tujuan itu sendiri; tujuan yang dikerjar bukan demi mempertahankan hidup, melainkan demi keinginan dan kesenangan dalam melakukannya (**Fromm, 2001**).

Faktor-faktor biologis yang melandasi pembunuhan, yang telah dimasukkan dalam psikologi manusia, dapat diukur dengan begitu mudahnya anak laki-laki tertarik pada kegiatan berburu, memancing, bertarung dan perang-perangan. Bukan

berarti bahwa kecenderungan ini mudah dipelajari, disalurkan, dan dihargai secara sosial dalam sebagian besar budaya. Ketrampilan dan kegemaran membunuh biasanya dikembangkan dalam permainan dan pola-pola permainan yang disiapkan bagi anak-anak untuk peran mereka di saat dewasa kelak (**Lancaster et al, 1968**). Kaum pria menikmati perasaan akan kebenaran mutlak, bahkan di saat mereka melakukan tindakan kejam. Pemikiran konseptual dan tanggungjawab moral mereka sedang berada pada titik terendah, diutarakan oleh **Lorenz (Fromm, 2001)**.

Hasrat manusia (misalnya, keinginan untuk mendapatkan cinta, kelembutan hati, dan kebebasan, serta keinginan untuk melakukan tindak destruktif, sadis, masokis, dan keinginan untuk memiliki kekuasaan dan harta) merupakan sarana untuk memenuhi "kebutuhan eksistensial", yang pada gilirannya berakar dari kondisi eksistensi manusia itu sendiri (**Fromm, 2001**).

Kelompok manusia memiliki tingkat kedestruktifan masing-masing yang berbeda secara fundamental sehingga fakta-fakta hampir tidak dapat dijelaskan dengan asumsi bahwa kedestruktifan dan kekejaman merupakan pembawaan. Beragam tingkat kedestruktifan bisa dikorelasikan dengan faktor-faktor psikis yang lain dan dengan perbedaan dalam masing-masing struktur sosialnya. Derajat kedestruktifan meningkat seiring dengan meningkatnya perkembangan peradaban, bukan sebaliknya (**Fromm, 2001**).

Agresi intraspesifik (agresi diantara anggota spesies yang sama) berfungsi untuk mempertinggi daya tahan hidup spesies yang bersangkutan dan menerapkan urutan strata sosialnya, diutarakan oleh **Lorenz (Fromm, 2001)**.

Apa yang dapat dan kerap memunculkan agresi adalah sesuatu yang diartikan sebagai frustrasi, dan makna psikologis dari frustrasi tentunya berbeda-beda sesuai dengan kondisi sosial setempat. Yang memicu agresi bukanlah pelanggaran semata, melainkan ketidakadilan atau penolakan yang dilakukan dalam situasi tersebut. Dalam kajiannya tentang agresi yang berorientasi behavioristik, agresi dan kekerasan berlandaskan frustrasi-agresi, diutarakan oleh **Dollard (Fromm, 2001)**. Frustrasi memiliki dua makna, diutarakan oleh **Buss (Fromm, 2001)**:

- A. Terhentinya aktifitas bertujuan yang sedang berlangsung
- B. Frustrasi sebagai penghilangan hasrat atau keinginan – "putus harapan"

Perasaan tertekan, frustrasi, ancaman dari penghuni lainnya, kebutuhan fisik yang kurang memadai dan hilangnya kebebasan dalam lingkungan Rutan/Lapas dapat mendorong sifat agresif para tahanan dan narapidana. Manusia dikendalikan

oleh dorongan bawaan untuk menyelamatkan diri; dia boleh jadi berupaya mengendalikan dorongan ini dengan pemikirannya, akan tetapi pengendalian ini terbukti relatif tidak efisien, sekalipun beberapa cara dapat ditemukan untuk mengekang kekuatan "insting penyelamatan-diri" (Fromm, 2001). MacLean menamakan mekanisme otak yang fundamental sebagai empat F: "feeding (mengumpani), fighting (memerangi), fleeing (menyelamatkan diri), dan fucking (untuk kegiatan seks)", diutarakan oleh MacLean (Fromm, 2001). Pendapat Charles Darwin (1946) bahwa "struktur dan fungsi otak diatur oleh prinsip kelangsungan hidup individu atau spesies".

Kondisi para tahanan dan narapidana dalam Rutan/Lapas dengan segala permasalahannya rentan membangkitkan sifat agresif mereka yang berujung pada tindak kekerasan. Sebagai misal, orang sudah banyak yang tahu bahwa sadisme jauh lebih sering dijumpai di kalangan individu-individu frustrasi dan kelompok-kelompok sosial yang merasa tidak berdaya dan sedikit memperoleh kebahagiaan hidup. Dari sekian banyak ancaman yang membahayakan kepentingan hayati manusia, ancaman terhadap kebebasannya adalah yang dianggap paling membahayakan, baik secara individual maupun sosial (Fromm, 2001).

Permasalahan para tahanan dan narapidana dalam menjalani kehidupannya dalam Rutan/Lapas bertambah berat ketika terjadi overkapasitas, yang memiliki potensi yang sangat tinggi merangsang agresifitas mereka. Kian sesaknya ruangan mengakibatkan peningkatan agresi, akan tetapi perubahan struktur sosial dengan kehadiran individu atau kelompok baru justru "menimbulkan peningkatan interaksi agresif yang lebih dramatis dibanding dengan yang diakibatkan oleh perubahan lingkungan". Ada dua unsur dalam keberjejalan yang harus dipisahkan. Yang pertama adalah "menyempitnya ruangan"; kedua adalah "rusaknya struktur sosial" (Southwick, 1964). Karena itu, dengan "hilangnya keleluasaan", individu merasa terancam lantaran berkurangnya fungsi-fungsi hayatinya dan selanjutnya ia akan bereaksi agresif. Kerusakan struktur sosial akibat berjejalan menimbulkan ancaman besar terhadap eksistensi makhluk hidup. Kemungkinan besar yang akan timbul adalah agresi yang intens, mengingat adanya unsur pemertahanan-diri dalam perilaku agresi, terutama ketika individu tidak lagi sempat menyelamatkan diri (Fromm, 2001).

Manusia membutuhkan sistem sosial di mana ia memiliki tempat tinggal dan di mana hubungannya dengan sesamanya relatif stabil serta didukung dengan nilai-



nilai dan gagasan yang diterima secara umum. Yang memiliki andil terhadap timbulnya agresi bukan hanya keberjejalan melainkan juga kondisi sosial, psikologis, budaya dan ekonomi (**Fromm, 2001**).

Segala keterbatasan dan kekurangan yang dihadapi oleh para tahanan dan narapidana dalam Rutan/Lapas merangsang naluri mempertahankan hidup, yang diwujudkan dalam persaingan dengan sesama penghuni dengan menunjukkan sikap-sikap agresif mereka, antara lain (**Fromm, 2001**):

#### **A. Agresi Defensif**

Agresi yang hanya ditujukan untuk mempertahankan hidup. Tujuan agresi defensif bukanlah untuk menghancurkan, melainkan untuk menjaga kelangsungan hidup. Bila tujuan ini telah dicapai, agresi tersebut, beserta emosinya, akan lenyap. Salah satu sumber agresi defensif terpenting adalah terlukainya perasaan narsisistik. Sumber lain agresi defensif, yang juga penting, adalah agresi sebagai reaksi terhadap segala upaya untuk memunculkan perlawanan dan cita-cita terpendam ke dalam kesadaran. Terjadi jika perasaan terpendam seseorang disinggung oleh orang lain.

#### **B. Agresi Kompromis**

Agresi kompromis terdiri dari bermacam tindakan agresi yang dilakukan bukan lantaran si agresor terdorong oleh nafsu destruktif, melainkan karena ia diperintahkan untuk melakukannya dan ia merasa wajib mentaati perintah itu. Ini sering terjadi dalam konflik antar kelompok, di mana pelaku hanyalah suruhan dari para pimpinannya. Sering terjadi dalam pertikaian antar suku maupun kelompok dalam Rutan/Lapas.

#### **C. Agresi Instrumental**

Agresi instrumental adalah agresi yang bertujuan untuk mendapatkan sesuatu yang diperlukan atau diinginkan. Yang menjadi tujuan bukanlah penghancuran, karena penghancuran itu sendiri hanya berfungsi sebagai sarana (instrumen) untuk mencapai tujuan yang sebenarnya, contohnya untuk mendapatkan kebutuhan pokok, materi, kedudukan dalam strata sosial serta kehormatan.

### **Pencegahan dan Penanggulangan Agresi Kekerasan**

Berangkat dari pendapat **Wan Usman (2003)**, dalam bukunya "Daya Tahan Bangsa" bahwa sesungguhnya keberingasan sosial itu harus ditanggulangi sedini

mungkin secara bersungguh-sungguh dan berkelanjutan, karena ia bagaikan wabah yang dapat menjalar setiap waktu ke segala penjuru tanah air.

Sifat agresif bawaan sebagai manusia pada tahanan dan narapidana sangatlah berpotensi melahirkan konflik dengan tindak kekerasan. Namun keagresifan tersebut dapat ditanggulangi, dicegah, bahkan diarahkan pada hal-hal positif dan bermanfaat. Upaya-upaya yang dapat dilakukan, antara lain:

- A.** Mengusahakan para tahanan maupun narapidana (setidaknya para pemimpin atau pemuka) dapat mengenal satu sama lain dalam hubungan yang sehat dan saling membutuhkan. Semakin berbahayanya agresi yang tertahan, semakin baik anggota kelompok itu mengetahui, memahami serta menyukai satu sama lain. Sikap saling membutuhkan dapat mencegah pertengkaran dengan orang asing atau orang di luar kelompok persahabatan mereka. Fakta bahwa orang dapat melupakan kediriannya (atau lebih tepatnya egoisme) demi kehendaknya untuk membantu sesama, diutarakan oleh **Lorenz (Fromm, 2001)**.
- B.** **Leyhausen (1965)** menegaskan bahwa tidak ada pengobatan lain untuk menyembuhkan "pemberontakan", "kekerasan" dan "neurosis" (penyakit syaraf) kecuali dengan "menjaga keseimbangan jumlah individu di dalam masyarakat manusia dan segera mencari sarana efektif untuk mengendalikannya pada tingkatan yang optimum".
- C.** Penyelesaian masalah secara musyawarah dengan mediasi sesepuh atau orang lain yang disegani. Peperangan biasanya bermula dari pertengkaran antar individu, dan ini sangat perlu untuk segera dicegah agar tidak berkelanjutan. Dalam masyarakat ini peradilan bagi dua orang yang bertengkar biasanya dilaksanakan oleh sesepuh yang masih berkerabat dengan keduanya. Idealnya sesepuh ini memiliki hubungan yang sama eratnya dengan kedua orang yang bertengkar, karena dengan demikian ia cenderung tidak akan memihak salah satunya. Namun tentunya, yang terjadi tidak selalu begitu, dan lagi, orang yang memiliki ikatan keluarga dengan sesepuh belum tentu bersedia diadili. Terkadang yang satu nyata-nyata tidak bersalah, atau yang satu populer yang satunya lagi tidak, sehingga dalam hal ini masyarakatlah yang akan memberi penilaian, dan permasalahannya akan segera selesai setelah masyarakat mengumumkan penilaian tentang keduanya (**Fromm, 2001**).

### 3.1.3. Konflik Kekerasan

Sebuah 'kekerasan' juga tidak dapat dilepaskan dari adanya sebuah "konflik", karena pada dasarnya tindak kekerasan terlahir dari suatu pertentangan atau konflik. Di mana konflik adalah suatu perwujudan dari adanya dua atau lebih kepentingan dan keinginan serta berbagai kebutuhan yang saling bertentangan. Konflik dalam kehidupan manusia dapat terjadi jika terdapat adanya pertentangan kebutuhan, keinginan dan tujuan yang hendak dicapai. Konflik dalam kehidupan manusia dapat bersifat internal maupun eksternal.

Menurut **Alisjahbana S.T** konflik adalah suatu perbedaan pendapat dan pandangan diantara kelompok-kelompok masyarakat dalam mencapai tataran nilai yang sama, sedangkan menurut **Freeman** yang mengemukakan bahwa konflik dapat terjadi dalam setiap komunitas masyarakat termasuk dalam lingkungan organisasi (**Akdon et al, 2005**). Secara khusus, dalam lingkungan organisasi konflik merupakan suatu keadaan ketidaksepakatan soal alokasi sumberdaya yang langka atau perselisihan menyangkut tujuan, status, nilai, persepsi atau kepribadian. Kondisi perbedaan pendapat dan persepsi mengenai tujuan, kepentingan maupun status serta nilai individu dalam suatu organisasi inilah yang disebutkan sebagai pengertian konflik. Beberapa pengertian tentang konflik yang telah diuraikan tersebut menggambarkan bahwa pada dasarnya konflik adalah suatu perwujudan dari adanya dua atau lebih kepentingan dan keinginan serta berbagai kebutuhan yang saling bertentangan.

Faktor penyebab terjadinya konflik dengan kekerasan dalam lingkungan penghuni (Tahanan dan Narapidana) Rutan Klas 1 Jakarta Pusat secara garis besar dibagi menjadi 2 (dua) bagian yakni: faktor internal (dalam diri sendiri) dan faktor eksternal (luar diri, dengan orang dan atau kelompok lain). Berikut ini terdapat beberapa uraian teori yang dirangkum oleh **Rauf (2002)** tentang ulasan berbagai penyebab terjadinya suatu konflik dalam kehidupan manusia sebagai bagian dari masyarakat, antara lain:

#### A. Teori Hubungan Masyarakat

Konflik ditinjau dari teori hubungan masyarakat dapat terjadi karena adanya ketidakpercayaan, munculnya rasa permusuhan, dan adanya polarisasi yang secara terus menerus terjadi di antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam suatu masyarakat.

## **B. Teori Negosiasi Prinsip**

Teori ini beranggapan bahwa konflik disebabkan oleh terdapatnya posisi-posisi yang tidak selaras dan adanya perbedaan pandangan dari pihak-pihak yang menangani suatu konflik. Dengan demikian pihak yang berperan sebagai mediator dalam penanganan suatu konflik ternyata selain berpengaruh dalam menyelesaikan konflik juga dapat menimbulkan suatu konflik baru, apabila prinsip ataupun solusi penyelesaian yang ditawarkan sangat berbeda dengan prinsip yang dianut oleh pihak-pihak yang tengah berkonflik tersebut.

## **C. Teori Kebutuhan Manusia**

Teori kebutuhan manusia ini berasumsi bahwa konflik berakar dalam diri seseorang yang terbentuk karena terhalangnya pemenuhan kebutuhan dasar yang ada dalam dirinya, baik secara fisik, psikis, dan sosialnya. Setiap manusia pada dasarnya adalah suatu hirarki dari kebutuhan yang sifatnya primer biologis sampai dengan kebutuhan yang paling tinggi yakni aktualisasi diri. Lebih jauh diuraikan bahwa manusia memiliki lima kebutuhan yang harus dipenuhi secara berjenjang yakni; kebutuhan primer biologis seperti sandang pangan dan papan; kebutuhan akan rasa aman (keamanan); kebutuhan afiliasi (seperti berteman, menjadi bagian dari kelompok, berinteraksi, dan lain-lain); kebutuhan akan penghargaan diri sebagai wujud adanya pengakuan akan eksistensi dan identitas dirinya; dan kebutuhan aktualisasi diri (seperti memiliki otonomi diri, mengeluarkan potensi dirinya untuk suatu perbaikan). Apabila kebutuhan yang paling rendah belum dapat terpenuhi dengan baik, maka kebutuhan berikutnya tidak akan diupayakan pemenuhan pada tingkat yang lebih tinggi. Jika upaya pemenuhan masing-masing kebutuhan tersebut terhalang, maka akan dapat menyebabkan suatu ketidak-seimbangan dan terbentuknya konflik dalam diri yang bersangkutan. Adanya konflik-konflik dalam diri seseorang selanjutnya akan mendorong mencuatnya konflik terhadap lingkungan sekitarnya. Demikian juga ketika individu menemukan kendala atau penghalang yang bersumber dari lingkungan dalam pemenuhan kebutuhan tersebut akan menimbulkan konflik.

## **D. Teori Identitas**

Teori identitas ini berasumsi bahwa konflik dapat disebabkan oleh terancamnya identitas diri seseorang, kelompok ataupun komunitas tertentu. Seorang individu, kelompok masyarakat ataupun komunitas tertentu. Seorang

individu, kelompok masyarakat ataupun komunitas tertentu akan dapat terancam bahkan kehilangan identitasnya karena tekanan situasional sesaat, namun identitas diri seseorang tersebut kebanakan diakibatkan oleh adanya penderitaan ataupun pengalaman di masa lalu yang kurang menyenangkan. Pengalaman traumatis ini akan dapat menyebabkan seseorang merasa bahwa dirinya sudah tidak memiliki identitas sehingga tercetuslah konflik dalam dirinya baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap lingkungan sekitarnya.

#### **E. Teori Kesalah-pahaman Antar Budaya**

Teori ini berasumsi bahwa konflik disebabkan oleh adanya ketidak sesuaian tata cara dalam berkomunikasi antara orang perorangan, kelompok masyarakat yang memiliki perbedaan latar belakang budaya. Komunikasi dalam hal ini bukan hanya terbatas dalam hal komunikasi verbal, namun termasuk juga komunikasi non verbal yang dalam kenyataannya dapat berbeda arti antara budaya yang satu dengan kebudayaan lainnya.

#### **F. Teori Transformasi Konflik**

Teori ini berasumsi bahwa terjadinya suatu konflik disebabkan oleh adanya masalah-masalah ketidaksetaraan dan ketidakadilan yang muncul sebagai konsekuensi logis dari maraknya perkembangan masalah-masalah sosial, budaya, dan ekonomi. Ketidaksetaraan ini kemudian tertransformasikan dari satu pihak kepada pihak lain, sehingga terbentuklah suatu konflik.



**Gambar 8: Kerusuhan Massal 16 Juli 2006 (2)**  
**Sumber: KP-Rutan Klas I Jakarta Pusat**

### 3.1.4. Jenis-Jenis Konflik

Secara umum konflik yang biasa terjadi dalam kehidupan masyarakat dapat dibedakan dalam 3 (tiga) bentuk, sebagai berikut (**Maswadi, 2002**):

- A. Konflik bersifat laten, yaitu konflik yang sifatnya tersembunyi dan perlu dimunculkan agar dapat ditangani secara efektif.
- B. Konflik secara terbuka yaitu konflik yang sudah berakar dalam dan telah sangat terbuka sehingga diperlukan berbagai tindakan untuk mengatasi akar permasalahan dan berbagai efek yang ditimbulkannya.
- C. Konflik di permukaan yaitu memiliki akar yang dangkal atau bahkan tidak berakar, timbul karena kesalahpahaman mengenai sasaran yang dapat diatasi dengan meningkatkan komunikasi.

Sedangkan menurut **Winardi (1994)** bahwa konflik berdasarkan tipe-tipe situasi dibagi atas 4 (empat) bagian yaitu:

#### A. Konflik dari dalam diri individu

Konflik secara individual ini dapat muncul karena kelebihan beban peran dan ketidakmampuan seseorang menjalankan perannya. Salah satu perspektif tentang konflik di dalam diri individu mencakup 4 (empat) situasi sebagai berikut:

1. Konflik mendekat-mendekat (*Approach-Approach Conflict*)  
Seseorang memilih satu perilaku diantara dua tingkah laku yang atraktif atau dapat menguntungkan baginya.
2. Konflik menghindar-menghindar (*Avoidance-Avoidance Conflict*)  
Seseorang harus memilih satu perilaku diantara dua alternatif tingkah laku yang sama-sama tidak menguntungkan baginya.
3. Konflik mendekat-menghindar (*Approach-Avoidance Conflict*)  
Seseorang diperhadapkan dalam satu situasi yang sangat didambakannya, namun secara bersamaan dia sangat tidak diharapkan atau tidak diperbolehkan untuk memilih situasi tersebut.
4. Konflik mendekat-menghindar kombinasi (*Multiple Conflict*)  
Seseorang mengalami kombinasi konflik mendekat-menghindar sekaligus.

Dapat dibayangkan apabila seorang individu mengalami suatu konflik dalam kehidupannya, maka stress adalah produk tambahan yang dihasilkan oleh konflik tersebut.

**B. Konflik antar pribadi**

Konflik ini adalah suatu konflik yang terjadi antara satu orang dengan satu atau lebih orang lainnya. Kenyataan memperlihatkan bahwa semua orang pernah mengalami konflik antar pribadi ini. Konflik antar pribadi ini sifatnya substantif dan emosional, sehingga konflik ini dapat dikatakan sangat sering melibatkan sentimen personal.

**C. Konflik antar kelompok**

Konflik antar kelompok ini dapat terjadi antara satu kelompok dengan kelompok lain yang ada dalam satu lingkungan maupun dengan lingkungan lain.

**D. Konflik antar organisatoris**

Konflik ini merupakan konflik yang terjadi antara organisasi-organisasi baik organisasi sektor publik, swasta, partai-partai dan berbagai organisasi formal dan informal lainnya yang memiliki perbedaan kepentingan dan pertentangan tujuan.

**3.1.5. Penyelesaian Konflik**

Menurut Nitibaskara (1999), konflik tidak boleh dibiarkan berlarut-larut tanpa suatu penyelesaian, meskipun sebenarnya penyelesaian tersebut tidak selalu menjamin akan tuntasnya konflik tersebut. Hal ini dikarenakan bahwa pada dasarnya konflik mempunyai potensi untuk mengeras dan melebar hingga jauh dari pokok permasalahan semula, dan untuk itu perlu dihindarkan agar konflik tidak berpotensi untuk tumbuh menjadi suatu kekuatan yang merusak, maka perlu dilakukan penyelesaian dengan sebaik mungkin dan biasanya diawali dengan mengidentifikasi penyebab timbulnya konflik tersebut.

Agar potensi konflik tidak tumbuh menjadi suatu kekuatan yang merusak, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah melakukan identifikasi permasalahan penyebab berlangsungnya konflik tersebut. Setelah proses identifikasi dilakukan dan diketahui apa yang menjadi modus ataupun motif yang mendasari terjadinya konflik tersebut, kemudian dapat dibuatkan beberapa alternatif solusi untuk dijalankan sehingga konflik tersebut tidak meluas dan berubah menjadi suatu aksi pertikaian atau aksi kekerasan yang dapat memperkeruh suasana pihak-pihak yang berkonflik.

Menurut **Rauf (2002)** dalam menyelesaikan suatu konflik biasanya ditempuh dengan berbagai cara dan metode penyelesaian yang lebih sering dilakukan adalah dengan komunikasi persuasif (perundingan), namun jika hal ini tidak lagi memungkinkan dilakukan, maka cara penyelesaian yang paling lazim dilakukan adalah dengan cara-cara koersif (kekerasan). Penyelesaian konflik yang paling ideal sebenarnya adalah cara penyelesaian yang persuasif karena dalam perundingan dilakukan secara rasional dan biasanya berbentuk musyawarah. Sementara cara koersif dianggap kurang sesuai karena penggunaan kekerasan atau ancaman dianggap bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Dengan kata lain, kompromi tercapai bila pihak-pihak yang berkonflik menyetujui hal yang sama yang ada dalam pendapat yang dianut pihak-pihak yang berkonflik tersebut. Pendapat dari **Rauf (2002)** mengenai penyelesaian ataupun pengelolaan konflik dapat dilakukan melalui beberapa upaya, antara lain :

- A. Pencegahan konflik yang bertujuan mencegah timbulnya suatu konflik yang lebih luas dan menghindari munculnya perilaku kekerasan melalui suatu persetujuan atau kesepakatan damai.
- B. Pengelolaan konflik bertujuan untuk mengatasi dan menghindarkan kekerasan dengan mendorong perubahan perilaku yang positif bagi pihak-pihak terlibat.
- C. Resolusi konflik, yakni menangani sebab-sebab terjadinya konflik dan berusaha membangun hubungan baru yang dapat tahan lama diantara kelompok-kelompok yang saling bermusuhan. Semakin mendalamnya suatu konflik, berarti semakin tajamnya perbedaan diantara masing-masing pihak yang terlibat konflik tersebut dan semakin meluasnya suatu konflik, maka berarti semakin banyak jumlah orang yang terlibat dalam konflik tersebut.
- D. Transformasi Konflik, yang merupakan upaya pengendalian sumber-sumber konflik sosial dan politik sehingga tidak meluas, dan berusaha mengubah kekuatan negatif dari pertentangan menjadi kekuatan sosial dan politik yang positif.

Lebih jauh diuraikan bahwa mengingat luasnya cakupan suatu konflik, maka tidak ada suatu jalan pemecahan yang sifatnya tunggal. Setiap peristiwa konflik memiliki keunikannya sendiri-sendiri, sehingga tidak ada metode penyelesaian yang mujarab yang dapat diterapkan untuk penyelesaian semua jenis-jenis konflik. Oleh sebab itu penguasaan atas latar belakang timbulnya konflik tersebut sangat diperlukan untuk menentukan cara pemecahan yang tepat, karena penyelesaian



secara tambal sulam, hanya akan menyebabkan konflik menjadi suatu bahaya laten, sementara inkonsistensi dalam penyelesaian konflik dan justru semakin memperluas wilayah konflik tersebut. Sebagaimana yang dikemukakan oleh **Hollin (1992)**, bahwa perubahan situasional lingkungan akan mempengaruhi perubahan perilaku seseorang.

Cara terbaik dalam mengatasi suatu konflik agar tidak semakin meluas dan tidak muncul kembali di masa yang akan datang adalah dengan mengelola konflik secara konstruktif, artinya situasi konflik yang merugikan dirubah menjadi situasi yang dapat menguntungkan pihak yang berkonflik. Upaya ini dilakukan dengan cara: menghindarkan konflik tersebut, merubahnya menjadi suatu bentuk kompetisi, mengakomodasinya, dan melakukan kompromi sebagai jalan damai, serta berkolaborasi ataupun bekerjasama untuk melakukan penyelesaian konflik tersebut.

Menurut **Winardi (1994)**, bahwa keberhasilan dalam menangani suatu konflik, sangat dipengaruhi oleh kemampuan memahami proses-proses dan elemen-elemen yang melandasinya. Dengan demikian penanganan konflik harus diawali dengan pemahaman yang melandasi munculnya konflik tersebut sebab dalam kenyataannya konflik sering dirasakan namun tidak diketahui penyebabnya secara pasti, apalagi konflik tersebut belum terlihat ke permukaan (termanifestasi). Kemudian setelah identifikasi penyebab ini dilakukan, maka respon dari pihak yang tengah berkonflik tersebut adalah bervariasi dan respon yang paling umum adalah bersikap acuh terhadap konflik, menekan konflik tersebut, dan menyelesaikannya dengan cara-cara kesepakatan damai.

## **3.2. BUDAYA KEKERASAN DALAM PENJARA**

### **3.2.1. Pengertian Budaya Kekerasan**

Budaya adalah suatu konsep yang membangkitkan minat, dan secara formal budaya didefinisikan sebagai tatanan pengetahuan, pengalaman, kepercayaan, nilai, sikap, makna, hirarki, agama, waktu, peranan, hubungan ruang, konsep alam semesta, objek-objek materi dan milik yang diperoleh sekelompok besar orang dari generasi ke generasi melalui usaha individu dan kelompok (**Mulyana, 2005**).

Sedangkan sub budaya atau sub kultur adalah suatu komunitas rasial, etnik, regional, ekonomi atau sosial yang memperlihatkan pola perilaku yang

membedakannya dengan berbagai subkultur lainnya dalam suatu budaya atau masyarakat yang melingkupinya. Berkenaan dengan budaya kekerasan dalam penjara di mana dalam hal ini Rutan Klas I Jakarta Pusat, sebagai tempat melaksanakan masa penahanan dan kehilangan kemerdekaan bagi mereka yang menjalani penahanannya maupun menjalani pidananya, identik dengan suatu kekerasan yang mencekam dan meresahkan. Di mana suatu kekerasan yang ada dalam penjara dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu :

**A. Faktor psikologis sebagai dampak dari pemenjaraan.**

Dampak psikologis yang dirasakan oleh tahanan dan narapidana akibat dari hilangnya kemerdekaan di dalam dirinya, lebih berat dibandingkan dengan pidana yang dijatuhi pada dirinya itu sendiri karena bukan hanya fisiknya saja yang terbelenggu oleh tembok penjara melainkan juga psikologisnya. Sehingga tanpa adanya budaya kekerasan sekalipun, tahanan dan narapidana telah mengalami suatu kekerasan secara psikis yang dirasakan sebagai suatu kerugian atau penderitaan seperti yang dikemukakan oleh **Sykes (1970)** tentang beberapa derita yang diakibatkan dari hilangnya kemerdekaan antara lain:

1. Hilangnya kemerdekaan diri (*lost of liberty*)
2. Hilangnya akses pelayanan yang memuaskan (*lost of good and service*)
3. Hilangnya relasi seksual dengan lawan jenis (*lost of heterosexual relationship*)
4. Hilangnya otonomi diri (*lost of authonomy*)
5. Hilangnya rasa aman (*lost of security*)

Dengan dialami hilangnya lima rasa diatas, maka sangat mungkin sekali membuat para tahanan dan narapidana tertekan, di mana akibat dari tekanan tersebut lahir sejumlah efek yang negatif baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain seperti makian atau cacian hingga tindakan anarkis.

**B. Sub kultur penghuni penjara.**

Karakteristik yang ada dalam suatu lingkungan penjara adalah suatu institusi yang menampung sekaligus mengatur hidup orang banyak secara seragam, dengan peraturan yang sangat terinci dan pengawasan yang ketat, serta adanya kekuasaan yang ada dalam sekelompok penguasa subkultur yang seperti ini menjadi sumber manipulasi sebagai suatu "sekolah kejahatan".

Sub budaya kekerasan merupakan seperangkat aturan yang menghendaki pelaksanaan kekerasan, ketika keberanian seseorang individu atau kehormatannya ditantang, dihina, atau diintimidasi oleh senjata. Di mana selanjutnya mereka menyimpulkan bahwa sub budaya kekerasan itu antara lain sebagai norma-norma tentang tingkah laku yang pantas untuk situasi tertentu yang menyebabkan kejahatan kekerasan, diantara norma-norma yang mereka anut mempengaruhi keagresifan mereka terhadap orang lain dan melemahkan hambatan sosial terhadap kekerasan (**Ferracutti, 1970**).

Manusia akan berbuat, merasa dan berpikir dengan cara-cara yang terbukti merupakan metode yang jitu untuk mendapatkan apa yang ia inginkan. Agresi yang melahirkan kekerasan seperti halnya perilaku yang lain, murni dipelajari berdasarkan pertimbangan untung-rugi (**Fromm, 2000**).

Keberadaan sub kebudayaan ini diyakini mereka akan membuat orang-orang menganggap bahwa sistem nilai adalah bagian lain dari sistem sosial yang lebih dominan, yakni mempunyai aturan-aturan dan norma-norma sendiri. Alasan selanjutnya adalah norma dari suatu sub budaya diilhami oleh suatu sistem nilai yang menuntut lebih banyak kekuatan atau kekerasan.

Kekerasan yang diakibatkan suatu konflik dalam lingkungan penjara muncul, karena banyaknya perbedaan yang dimiliki oleh masing-masing penghuni tersebut, baik perbedaan latar belakang budaya dan kebiasaan serta status sosial ekonomi. Perbedaan inilah yang mempertajam pertentangan dalam kehidupan mereka apa lagi hal tersebut dilalui secara berulang-ulang ketika proses pembauran hidup mereka berlangsung. Dengan kata lain, pada saat interaksi sosial berlangsung maka perbedaan dalam diri masing-masing penghuni akan membentuk transformasi tata cara hidup dan pada saat proses ini berjalan maka aksi-aksi kekerasan dalam kehidupan mereka kian merebak. Kondisi ini menyulitkan pihak pengelola institusi penjara dalam mengendalikan sumber-sumber pemicu aksi kekerasan dalam kehidupan penghuni penjara tersebut.

Konflik dengan kekerasan terus berkembang dalam masyarakat luas. Meskipun dapat terlihat secara nyata, namun dalam upaya mengatasinya bukanlah sesuatu yang mudah. Demikian halnya di dalam penjara, konflik kekerasan yang terjadi di dalamnya hampir tidak pernah dapat teratasi dengan tuntas meskipun mereka berada dalam lingkungan yang sangat tertutup akan pengaruh luar. Terbatasnya interaksi dengan dunia luar penjara inilah yang menjadikan para

penghuni membentuk suatu sistem sosial dan budaya yang berbeda dengan kehidupan masyarakat luas, meskipun beberapa aspek dalam sistem sosial dan budaya tersebut diadaptasi dari sistem sosial masyarakat luas, tetapi dalam kenyataannya sistem dan budaya tersebut telah mengalami perubahan bahkan pergeseran nilai sehingga dalam lingkungan penjara tindak kekerasan menjadi bagian sistem sosial yang membudaya. Dengan kata lain, konflik kekerasan dalam kehidupan para penghuni penjara menjadi salah satu aspek budaya yang berkembang dalam komunitas masyarakat penghuni penjara.

### **3.2.2. Tindak Kekerasan dalam Penjara**

Kekerasan lahir dari sikap dan perilaku agresif manusia, di mana agresifitas ini muncul ketika seseorang tersebut kehilangan kontrol diri dan dimanifestasikan dalam aksi atau tindakan yang merusak kepada dirinya sendiri maupun kepada orang lain. Menurut **Hollin (1992)**, bahwa perilaku kekerasan manusia yang merupakan dampak proses interaksi dengan lingkungannya. Maka dapat disimpulkan bahwa konflik kekerasan yang terjadi dalam lingkungan Rutan Klas I Jakarta Pusat salah satunya disebabkan dan terbentuk oleh proses interaksi lingkungan itu sendiri.

Tindak kekerasan yang terjadi di dalam penjara lahir akibat dari pertentangan-pertentangan sosial yang ada sebelumnya baik pertentangan antara individu maupun antar kelompok. Maka agar dapat menghindari atau setidaknya meminimalisir terjadinya suatu tindak kekerasan dikalangan Tahanan dan Narapidana maka mutlak dibutuhkan pengelolaan dengan baik.

Terisolirnya serta terbatasnya kehidupan komunitas penghuni penjara menjadikan penjara dipandang oleh masyarakat luas sebagai suatu tempat yang tidak layak untuk ditempati karena sangat rentan sebagai tempat terjadinya konflik yang berujung pada suatu kekerasan sebagaimana yang di utarakan oleh **Atmasasmita (Aditama, 2007)**, yaitu salah satu persoalan yang muncul dalam kehidupan masyarakat ialah kekerasan pada umumnya di mana masalah kekerasan adalah masalah abadi dalam kehidupan manusia, karena ia berkembang sejalan dengan perkembangan tingkat peradaban manusia. Kekerasan yang terjadi dalam suatu penjara mempunyai beberapa bentuk, di mana masing-masing bentuk tersebut terkait dengan bentuk tindak kekerasan itu sendiri serta pelaku dari tindak kekerasan tersebut, bentuk-bentuk tindak kekerasan tersebut adalah sebagai berikut :

- A. Kekerasan fisik.** Tindak kekerasan yang berupa kekerasan secara fisik yaitu dengan menyakiti atau melukai fisik atau tubuh seseorang yang dilakukan secara perorangan maupun kelompok.
- B. Kekerasan psikis.** Suatu tindak kekerasan yang berupa kekerasan secara kejiwaan atau psikis seperti ancaman, makian, penghinaan yang mengganggu emosi atau kejiwaan korbannya, dan dapat dilakukan secara perorangan maupun kelompok.
- C. Kekerasan sosial.** Suatu tindak kekerasan yang dilakukan oleh suatu komunitas masyarakat dalam suatu wilayah tertentu terhadap seseorang maupun kelompok yang mana tindak kekerasan ini biasanya berupa pengasingan dari komunitas utama yang ada dalam wilayah tersebut.

Suatu konflik dengan kekerasan adalah perwujudan dari tidak teratasinya pertentangan-pertentangan antara dua orang atau kelompok yang sedang bertikai. Keadaan seperti ini menurut **Cooke (Cooke et al, 1990)** adalah sangat memungkinkan terdapat dalam kehidupan komunitas penghuni penjara, di mana kondisi situasional lingkungan mereka yang sangat rentan memicu terjadinya perilaku-perilaku yang kurang mampu menyesuaikan diri dengan keadaan setempat sehingga timbulah pergolakan emosional yang mempersulit mereka dalam merespon secara lebih baik terhadap keadaan lingkungan tersebut. Gambar-gambar di balik ini memperlihatkan alat-alat yang digunakan dalam konflik kekerasan yang disita oleh petugas Kamp-II:



**Gambar 9: Senjata Tajam Hasil Razia**  
**Sumber: Dokumentasi Kamp II Rutan Klas 1 Jakarta Pusat**



**Gambar 10: Senjata Hasil Razia**  
**Sumber: Dokumentasi Kamp II Rutan Klas 1 Jakarta Pusat**

### 3.3. UPAYA RUTAN KLAS I JAKARTA PUSAT DALAM MENANGGULANGI TINDAK KEKERASAN

#### 3.3.1. Upaya Rutan Klas I Jakarta Pusat

Tugas Rutan dan Lapas sebagai unit pelaksana teknis pada jajaran Ditjen Pemasyarakatan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, bukan semata-mata hanya menjaga agar para Tahanan dan Narapidana tidak melarikan diri dari penjara, tetapi juga mengupayakan tercapainya keadaan aman dan tentram bagi seluruh penghuni maupun petugas dalam menjalani kehidupan bersama, serta menjaga keadaan harta benda inventaris yang merupakan kekayaan negara.

Tujuan pemidanaan adalah resosialisasi pelaku tindak pidana (jangka pendek), pencegahan kejahatan (jangka menengah), dan kesejahteraan sosial (jangka panjang) **Muladi (1992)**. Dan lebih lanjut lagi, **Sahardjo (1963)** dalam pidato penganugerahan gelar *Doktor Honoris Causa* dalam Ilmu Hukum di Universitas Indonesia pada tanggal 5 juli 1963 mengatakan suatu rumusan dari pidana penjara, yaitu selain menimbulkan suatu derita pada terpidana karena hilangnya kemerdekaan bergerak, juga membimbing terpidana agar bertobat, serta mendidik pelaku kejahatan sebagai bagian integral dari masyarakat Indonesia. Dengan kata lain pidana penjara selain sebagai bentuk penghukuman juga adalah sebagai suatu bentuk upaya pemasyarakatan.

Secara konsepsi sangatlah berbeda antara pemidanaan dalam sistem kepenjaraan dengan sistem pemasyarakatan, yaitu pembedaan perlakuan yang diberikan kepada para pelanggar hukum tersebut. Seperti yang dikemukakan oleh **Harsono (1995)**, konsepsi pemasyarakatan sangat berbeda dengan konsepsi sistem pemenjaraan di mana dalam sistem pemasyarakatan, seorang tahanan atau narapidana diperlakukan sebagai subyek, sedangkan dalam sistem pemenjaraan seorang tahanan atau narapidana hanya dianggap sebagai obyek semata. Dengan demikian sebagai manusia (subyek) seharusnya tahanan dan narapidana perlu dibimbing dan direhabilitasi dengan baik tanpa harus membuat mereka menjadi lebih buruk dari keadaan mereka sebelumnya, seperti yang tercantum dalam sepuluh Prinsip Pemasyarakatan yang menjadi dasar tujuan sistem pemasyarakatan, yaitu :

- A. Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga negara yang berguna dalam masyarakat.
- B. Penjatuhan pidana bukan sebagai pembalasan dendam dari negara.
- C. Tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan melainkan dengan bimbingan.

- D. Negara tidak berhak membuat seseorang menjadi lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum ia masuk lembaga.
- E. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, Narapidana harus diperkenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
- F. Pekerjaan yang diberikan kepada Narapidana tidak boleh hanya bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukan bagi kepentingan Lembaga atau negara saja. Pekerjaan yang diberikan harus untuk pembangunan negara.
- G. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan atas Pancasila.
- H. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia, meskipun ia tersesat. Tidak boleh ditunjukkan pada narapidana atau tahanan tersebut bahwa mereka seorang penjahat.
- I. Narapidana itu hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan.
- J. Sarana fisik dewasa ini merupakan salah satu hambatan pelaksanaan sistem pemasyarakatan.

Berdasarkan kesepuluh Prinsip-prinsip Pemasyarakatan tersebut diatas, maka sebagai institusi atau lembaga yang berwenang melaksanakan penahanan dan pemidanaan, idealnya Rumah Tahanan Negara maupun Lembaga Pemasyarakatan harus dapat memberikan jaminan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai bentuk keamanan dan kenyamanan institusi penjara itu sendiri. Di mana dengan keamanan dan kenyamanan yang diberikan, segala bentuk tindak kekerasan yang mungkin terjadi dapat dijauhkan ataupun dicegah.

Rutan Klas I Jakarta Pusat dalam melaksanakan tugas dan fungsi pokoknya, mencoba untuk tetap eksis meskipun dengan keadaan sarana dan prasarana yang sangat minim, baik secara kuantitas maupun kualitas dan dengan keadaan jumlah penghuni yang overkapasitas tentunya menjadikan Rutan menjadi tempat yang subur dalam terjadinya suatu tindak kekerasan di kalangan penghuninya.

Dengan demikian tentunya sangat diperlukan suatu cara atau teknik yang baik dalam penanggulangannya, dalam hal ini Rutan Klas I Jakarta Pusat menanggulangi suatu tindak kekerasan sebagai salah satu gangguan keamanan dan ketertiban secara umum yaitu dengan berdasarkan **Petunjuk Pelaksanaan** dan **Petunjuk Teknis Perawatan Rumah Tahanan Negara** yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, yaitu :



- A. Langkah-langkah pengamanan atas prinsip mencegah (preventif) lebih baik dari pada penindakan (represif).
- B. Mencegah sesuatu hal yang tidak diinginkan yaitu dengan bersikap waspada dan disiplin.
- C. Mencegah meluasnya kericuhan dengan cara :
  1. Memberi tanda bahaya agar komandan jaga dan pos-pos lainnya mengetahuinya dan siap siaga.
  2. Mengadakan usaha-usaha pembatasan kejadian (lokalisir)
- D. Setiap petugas yang mendengar isyarat tanda bahaya tersebut wajib meneruskannya.
- E. Langkah-langkah lebih jauh adalah:
  1. Memberi isyarat tanda bahaya.
  2. Memberi perintah untuk menghentikan kericuhan.
  3. Jika tidak diindahkan memberikan tembakan peringatan keatas sebanyak tiga kali.
  4. Jika tidak diindahkan juga langsung menembak kakinya.
- F. Jika segala upaya tersebut diatas tidak membuahkan hasil dan pelaku kericuhan malah membahayakan petugas maka boleh menembak langsung.
- G. Apabila cara tersebut diatas tidak dapat menghentikan kericuhan yang terjadi maka komandan jaga dapat meminta bantuan kepolisian dalam penanggulangannya.

Pengamanan adalah tindakan untuk menciptakan rasa bebas dari gangguan dan ancaman, baik fisik maupun psikis, rasa kepastian dan bebas dari kekhawatiran, keragu-raguan dan ketakutan, rasa kedamaian dan ketentraman lahir dan batin (**Kamus Istilah Intelijen, Badan Intelijen Keamanan, PT Panca Darma Sejati, Cetakan Kedua, Jakarta, Mei 2004, hal. 79**). Keamanan adalah memberikan pada lembaga (korporasi) dengan mengurangi kehilangan-kehilangan yang dapat dicegah dengan tingkah laku umum dan di tingkah laku anti sosial (**Sennewald, 1978**).

Sedangkan **Strauss (1980)** dalam bukunya "*Security Problem in Modern Society*", mengatakan bahwa :

*Security is the prevention of losses of all kinds, from whatever cause. As applied to proprietary organization or institutions, security has come to mean all those measures, Physical, or procedural, which are concerned with preventing losses*

*caused by man-made, or natural hazards, protecting people and property, maintaining order, and preventing crime or other wrongful personel conduct decrimental to the goals of the affected orgnizations.*

Terjemahan bebasnya adalah :

Pengamanan adalah pencegahan dari segala macam bentuk kerugian, oleh sebab apapun. Sebagaimana diterapkan dalam organisasi swasta atau instansi, keamanan menjadi berarti untuk semua ukuran, fisik atau prosedur, di mana berhubungan dengan pencegahan kerugian yang diakibatkan manusia, atau bencana alam, melindungi orang dan bangunan, pemeliharaan instruksi, dan mencegah kejahatan atau kesalahan karena tingkah laku perorangan yang merugikan bagi tercapainya tujuan organisasi tersebut.

Upaya institusi Rutan Klas 1 Jakarta Pusat dalam menangani pelanggaran Tata Tertib yang dilakukan oleh para Tahanan dan Narapidana dalam lingkungan Rutan, selain dilakukannya pengembangan tata laksana pengamanan yang senantiasa disesuaikan dengan perubahan dan perkembangan masyarakat luas, juga tetap mengacu pada PROTAP penanggulangan gangguan keamanan dan ketertiban dalam lingkungan Lapas dan Rutan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM RI sebagai acuan secara Nasional (PROTAP, Prosedur Pelaksanaan Tugas pada Rutan dan Lapas, Dirjen Pemasyarakatan, 2004, Jakarta).

Uraian pelaksanaan pengamanan dalam Protap, Juklak dan Juknis sifatnya masih sangat umum dan cenderung mengacu pada penanggulangan setelah kejadian berlangsung (represif). Uraian mengenai faktor-faktor tindak kekerasan seperti: jenis masalah atau konflik yang terjadi, motivasi dan pelaku, faktor pemicu, serta pencegahan tidak terdapat dalam uraian Protap.

Dengan memperhatikan faktor-faktor tersebut tentunya suatu permasalahan tindak kekerasan dapat diatasi dengan lebih baik agar tidak menimbulkan masalah lain yang lebih besar. Seperti diungkapkan oleh **Howison (Howison et al, 2008)** menangani kekerasan dalam penjara yang harus diperhatikan adalah menghindari masalah, amati dan pahami napi, motif dan pelaku agresi, langkah-langkah pencegahan, menghadapi orang-orang agresif, hindari menjadi panas, sikap, bersikap dalam situasi penuh kekerasan, masalah bagi petugas.

Pendapat **Howison** di atas mengandung arti bahwa penanganan tindak kekerasan yang terjadi di dalam lingkungan Rutan, tidak hanya bertujuan

menghentikan, tetapi juga mempelajari faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya, penyebab terjadinya dan apa saja sebagai pemicunya serta bahaya yang mungkin diakibatkan.

### **3.3.2. Kendala Penanggulangan Tindak Kekerasan Dalam Rutan Klas I Jakarta Pusat**

Para petugas Rutan Klas 1 Jakarta Pusat sebagai otoritas yang berwenang, dalam usahanya menanggulangi tindak kekerasan, menghadapi berbagai kendala dalam pelaksanaannya, antara lain:

- A.** Kendala pendanaan bagi pemenuhan kebutuhan pokok para Tahanan/Narapidana yang masih belum memadai.

Kurangnya pemenuhan kebutuhan mendasar bagi para tahanan dan narapidana, otomatis akan membuat mereka menjadi agresif dalam rangka mempertahankan hidup mereka. Kondisi ini sangatlah rawan bagi terjadinya tindak kekerasan yang akan mengganggu keamanan, ketertiban dan ketentraman dalam Rutan.

- B.** Overkapasitas

Selain adalah salah satu faktor penyebab timbulnya tindak kekerasan, juga merupakan salah satu faktor kendala penanganan tindak kekerasan, yang antara lainnya adalah kendala dalam pengawasan. Semakin tingginya tingkat keberjejalan/overkapasitas maka akan semakin tinggi tingkat kesulitan bagi personil pengamanan dalam melakukan tindakan preventif maupun represif.

- C.** Belum maksimalnya pemberdayaan tahanan dan narapidana

Pemberdayaan tahanan dan narapidana, antara lain kepala blok (Voorman), pembantu petugas (Tamping), serta sesepuh atau kepala suku sebagai perpanjangan tangan para petugas, diharapkan dapat membantu terutama dalam mencegah terjadinya kekerasan antar sesama penghuni. Namun dalam pelaksanaannya belum maksimal, antara lain dikarenakan latar belakang pendidikan dan pengetahuan serta kepedulian yang kurang akan tanggung jawab keamanan dan ketentraman, sering kali malah menjadi salah satu faktor pemicu terjadinya suatu tindak kekerasan, seperti perebutan kekuasaan di kalangan mereka serta status sosial sebagai pemimpin dalam komunitasnya.

**D.** Kurangnya sumber daya petugas

Jumlah petugas pemasyarakatan sebagai andalan dalam upaya pengamanan Rutan Klas 1 Jakarta Pusat sangatlah minim, apalagi dengan kondisi overkapasitas yang terjadi saat ini. Dengan kondisi yang minim tersebut, tingkat kesukaran yang dihadapi dalam penanganan tindak kekerasan sangatlah tinggi. Kondisi tersebut ditambah lagi dengan kurangnya profesionalisme serta kinerja dari para petugasnya, di mana sebagian besar petugas masih belum menguasai sepenuhnya arti tugas dan fungsi pokok sebenarnya sebagai petugas pemasyarakatan

**E.** Kurangnya sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana pendukung dalam pelaksanaan penanganan tindak kekerasan dalam Rutan Klas 1 Jakarta Pusat sangatlah minim, yang tentunya mempengaruhi efektifitas penanganan yang dilakukan. Minimnya sarana dan prasarana tersebut dirasakan baik berupa peralatan pendukung dalam penanganan tindak kekerasan (represif), maupun peralatan pendukung lainnya dalam upaya pencegahan tindak kekerasan (preventif), seperti kamera pengintai (cctv), dan lain lain.

**F.** Kurangnya koordinasi dengan instansi pemerintah lainnya

Dalam menangani konflik kekerasan dengan kondisi yang luar biasa, seperti kerusuhan maupun pertikaian massal antar kelompok dalam Rutan Klas 1 Jakarta Pusat, diperlukan koordinasi dengan pihak keamanan setempat antara lain Polisi. Begitu pula dengan Pemadam Kebakaran, Rumah Sakit maupun Angkatan Bersenjata, sesuai dengan kebutuhan kondisi yang berlaku. Namun pada saat ini, koordinasi Rutan Klas 1 Jakarta Pusat dengan instansi-instansi pemerintah tersebut dalam prosedur tetapnya hanya dilakukan pada kondisi luar biasa yang mengancam keamanan Rutan, tidak dilakukan secara berkala, serta kerjasama dalam tindakan pencegahannya (preventif) masih sangat minim.



**Gambar 11: Kondisi Kurangnya Pemenuhan Kebutuhan Pokok**  
**Sumber: Dokumentasi Kamp II Rutan Klas 1 Jakarta Pusat**



**Gambar 12: Kondisi Over Kapasitas**  
**Sumber: Dokumentasi Kamp II Rutan Klas 1 Jakarta Pusat**

Gambar-gambar di atas, mengilustrasikan kondisi kurangnya pemenuhan kebutuhan pokok bagi Tahanan/Narapidana dalam Rutan Klas 1 Jakarta pusat.

### **3.3.3. Implementasi Hukum Dalam Mereduksi Tindak Kekerasan**

Tindak kekerasan adalah suatu perbuatan yang merugikan orang lain di mana banyak peraturan yang mengatur akan hal ini sebagai sesuatu yang tidak boleh dilanggar sehingga apabila ada pelanggaran akan hal tersebut maka sudah tentu akan mendapat sanksi sebagai ganjaran dari pelanggaran hal tersebut karena kecendrungan kekerasan digunakan sebagai pelengkap suatu kejahatan sepertiseperti yang diungkapkan **Atmasasmita (2007)** berkaitan dengan kejahatan, maka kekerasan sering digunakan sebagai pelengkap dari bentuk kejahatan itu sendiri. Jika kita melihat apa yang tercantum dalam KUHP banyak sekali pasal-pasal yang mengatur suatu kejahatan dengan tindak kekerasan baik bersifat fisik maupun psikis antara lain (**Aditama, 2007**) :

- A.** Kejahatan Terhadap Nyawa Orang, yaitu kejahatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa (pembunuhan) atau percobaan pembunuhan diatur dalam pasal 338-350 KUHP.
- B.** Penganiayaan, yaitu perbuatan dengan sengaja terhadap orang lain yang membuat rasa tidak enak, sakit atau luka seperti mencubit, memukul,



menyiram dengan air aki, dan lain sebagainya. Berat ringannya penganiayaan tersebut diatur oleh KUHP pada pasal 351-358.

- C. Pencurian dengan kekerasan, yaitu menggunakan kekerasan sebagai cara untuk mempermudah aksi pencurian tersebut seperti menyekap di kamar, memukul dan lain sebagainya diatur pada pasal 365 KUHP.
- D. Pemerasan dan Mengancam, yaitu dengan memaksa orang lain untuk menuruti kemauannya yang menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum yaitu memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. diatur dalam pasal 368-371 KUHP.

Dari uraian pasal-pasal yang ada dalam KUHP diatas dapat terlihat jelas bahwa dalam bentuk apapun selama itu bertentangan dengan aturan (hukum Positif) karena kekerasan adalah sesuatu yang sangat merugikan dan untuk itu harus dapat ditanggulangi guna kedamaian dan kenyamanan hidup masyarakat. Seperti halnya juga dengan tahanan dan narapidana sebagai komunitas masyarakat dalam penjara mendapat perhatian, dalam hal ini seperti dikeluarkannya Surat Direktorat Jenderal Bina Tuna Warga Nomor DDP.2.3/4/9 Tahun 1971 pada tanggal 8 Desember 1971, yang berisi tentang larangan penganiayaan bagi narapidana/tahanan. Di mana diharapkan juga dengan surat tersebut dapat membantu menciptakan rasa kenyamanan dan keamanan bagi para tahanan dan Narapidana meskipun mereka sedang menjalani penahanan maupun pidananya.

Implementasi hukum dalam penanganan tindak kekerasan pada Rutan Klas 1 Jakarta Pusat selama ini telah dilakukan meski mengedepankan mediasi. Istilah populer penerapan sanksi hukum dalam Rutan/Lapas adalah Masih Ada Perkara (MAP).

#### **3.3.4. Upaya Pengendalian Tindak Kekerasan sebagai Fungsi Kontrol**

Adapun upaya-upaya pengendalian tindak kekerasan yang dapat dilakukan sebagai suatu bentuk dari upaya pencegahan tindak kekerasan yang mungkin terjadi, yakni dengan mencoba melakukan hal-hal yang dapat membantu menciptakan keamanan dan ketertiban dalam kehidupan para tahanan dan narapidana, dengan cara antara lain:

- A. Peningkatan kesadaran dan kepedulian dari setiap petugas akan pentingnya keamanan dan ketertiban Rutan guna pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah ada.

- B. Pembinaan keamanan bagi seluruh penghuni Rutan yaitu dengan penyuluhan ke setiap-tiap blok hunian secara bergantian dan terjadwal oleh petugas keamanan.
- C. Penerapan aturan yang berlaku sama bagi setiap penghuni yang ada didalam Rutan Klas I Jakarta Pusat.
- D. Pencegahan masuknya barang-barang terlarang seperti narkoba, miras, senjata tajam dan lain sebagainya kedalam Rutan dengan pengeledahan terhadap pengunjung yang akan berkunjung.
- E. Razia atau pengeledahan barang-barang terlarang seperti senjata tajam, minuman keras, narkoba dan barang terlarang lain sebagainya yang dapat memicu terjadinya tindak kekerasan didalam blok hunian.
- F. Pemberdayaan penghuni yang ada sebagai perpanjangan tangan petugas dengan adanya Sesepeh, Voorman dan Tamping
- G. Deteksi dini, yaitu dengan penggalangan dengan para penghuni yang masih mempunyai kepedulian akan pentingnya keamanan bagi mereka dalam menjalani penahanan maupun pidananya
- H. Pembangunan Blok Hunian yang baru guna mengurangi overkapasitas yang ada pada saat ini di Rutan Klas I Jakarta Pusat.

### **3.3.5. Upaya Strategis Penanggulangan Tindak Kekerasan**

Sebagai bentuk upaya penanggulangan tindak kekerasan dimulai dengan melakukan suatu pencegahan terjadinya suatu tindak kekerasan dengan mempelajari dan mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang dapat berpotensi sebagai pemicu terjadinya tindak kekerasan di mana hal tersebut dapat dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- A. Meningkatkan Sumber Daya Petugas
- B. Perbaikan dan penambahan sarana Keamanan
- C. Mengidentifikasi perubahan-perubahan situasi dan kondisi lingkungan
- D. Mengidentifikasi daerah-daerah yang rawan terjadinya tindak kekerasan
- E. Mengidentifikasi aktor penggerak terjadinya tindak kekerasan kolektif
- F. Meningkatkan dan mengembangkan sistem kontrol
- G. Manajemen konflik sebagai metode penyelesaian guna meminimalisir terjadinya tindak kekerasan.



Dengan upaya-upaya strategis di atas sangat diharapkan penanganan tindak kekerasan nantinya akan menjadi lebih efektif dan efisien. Karena dengan keadaan kualitas dan kuantitas petugas yang memadai serta sarana keamanan yang mendukung tentunya akan memberi dampak yang positif dalam perkembangannya, dengan catatan dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan dengan profesionalisme petugas yang tinggi.

### **3.4. PERENCANAAN STRATEGIS**

#### **3.4.1. Pengertian Perencanaan Strategis**

Sebuah organisasi dalam operasionalnya, memerlukan suatu manajemen dan pengelolaan yang baik. Pengorganisasian, pengawasan dan evaluasi terhadap progres atau perkembangan dari tahapan-tahapan pencapaian tujuan organisasi mutlak diperlukan. Kesemuanya itu memerlukan suatu perencanaan strategi yang matang dan tepat agar tercapai tujuan organisasi. Secara singkatnya rencana strategis dapat dianggap "Peta" agar tujuan organisasi tepat sasaran, tidak melenceng atau menyimpang. Dengan adanya perencanaan, orang-orang akan mempunyai pandangan baru dengan masa depan di masa yang akan datang nanti. Perencanaan juga dapat disebut langkah awal dalam mengerjakan sesuatu agar apa yang akan dikerjakan dapat berjalan dengan baik, efektif dan efisien dalam mencapai tujuannya. Banyak pula orang beranggapan bahwa perencanaan adalah suatu alat dalam mencapai suatu kepentingan atau tujuan yang ingin dicapai. Salah satu alasan pentingnya suatu perencanaan karena dengan adanya perencanaan, maka diharapkan terdapatnya suatu pengarahan kegiatan, pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ditujukan pada pencapaian tujuan (**Tjokroamidjojo dalam Djamin, 1984**). Salah satu prasyarat dari sebuah perencanaan yang baik adalah pemahaman atas kondisi internal maupun eksternal, dari faktor-faktor terdekat (endogen dan bersifat variabel) hingga terjauh (*given*, tak bisa dipengaruhi).

Jika ditinjau dari asal usul katanya, kata "strategi" berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu "*strategos*" yang berarti Jenderal (**Usman, 2004**). Dan bila diartikan secara harafiah maka kata strategi dapat diartikan sebagai "seni para Jenderal", yang bila dijabarkan ialah seni seorang Jenderal dalam rangka untuk memenangkan suatu peperangan, di mana untuk memenangkan suatu peperangan diperlukan suatu cara atau taktik yang jitu dalam menyusun rencana perang seperti penempatan para prajurit perang, jenis senjata yang tepat yang akan digunakan pada posisi tertentu

dan lain sebagainya. Dengan kata lain, strategi dalam konteks awalnya diartikan sebagai *generalship* atau sesuatu yang dikerjakan oleh para Jenderal dalam membuat rencana untuk menaklukkan musuh dan memenangkan peperangan.

Strategi adalah prioritas atau arah keseluruhan yang luas yang diambil oleh organisasi. Dan strategi adalah pilihan-pilihan tentang bagaimana cara terbaik untuk mencapai misi organisasi (Kaye et al, 2005). Menurut Faisal Basri bahwa organisasi yang baik adalah yang memiliki tujuan (*goals*) jelas berdasarkan visi dan misi yang disepakati oleh para pendirinya. Tujuan adalah hasil akhir aktivitas perencanaan. Tujuan merumuskan apa yang akan diselesaikan dan kapan akan diselesaikan, dan sebaliknya diukur jika memungkinkan. Pencapaian tujuan perusahaan merupakan hasil dari penyelesaian misi (Wheelen et al, 1996). Untuk mewujudkan tujuan tersebut, dibutuhkan cara untuk mencapainya, yang lazim disebut sebagai strategi. Selanjutnya disusun rencana (*plan*), seperangkat kebijakan (*policies*), tahap-tahap pencapaian, organisasi dan personalia yang mengisinya, anggaran dan program aksi (Kaye et al, 2005).

Pengertian strategik dalam hal ini lebih menekankan pada upaya mencapai tujuan secara efektif dan efisien dengan menyadari terbatasnya sumber daya yang dimiliki. Perencanaan strategik yang ditopang oleh pemahaman terhadap lingkungan eksternal akan membuat kita bisa bertahan dan bahkan semakin berkembang sekalipun badai kerap menerpa.

Rencana strategis dapat diartikan sebagai suatu kerangka strategis yang berisi prinsip-prinsip dasar strategis dan kerangka institusional dan mencakup langkah-langkah untuk mengubah situasi sekarang guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Disamping itu, rencana strategis merupakan bagian dari manajemen strategis. Menurut pendapat dari J. David Hunger & Thomas L. Wheelen, strategi diartikan sebagai sejumlah total aktivitas dan pilihan yang dibutuhkan untuk dapat menjalankan sebuah Perencanaan Strategis (Wheelen et al, 2003)

Hal ini juga sesuai dengan yang dikemukakan oleh Bryson (2004), bahwa “*strategic planning is a set of concepts, procedures, and tool designed to assist leader and managers with this task. Selanjutnya di bagian lain, .....Strategic planning may be defined as a disciplined effort to produce fundamental and action that share and guide what an organization (or other entity) is, what does and why it does It*”.

**10 (sepuluh) langkah dalam proses penyusunan perencanaan strategis:**

1. Menetapkan dan menyetujui sebuah proses untuk menyusun sebuah perencanaan strategis. Tujuan utamanya untuk menguji kesiapan penyusunan sebuah rencana strategis.
2. Mengidentifikasi mandat/ketetapan organisasi. Pada tahapan ini, persyaratan sebuah renstra dan apa saja yang diharapkan dari sebuah renstra mulai dianalisa.
3. Mengklarifikasi misi-misi dan nilai-nilai organisasional. Pada tahapan ini tujuan sebuah organisasi mulai diperjelas.
4. Menguji lingkungan internal dan eksternal untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, kesempatan dan ancaman.
5. Mengidentifikasi hal-hal yang berhubungan dengan hal strategis yang dihadapi sebuah organisasi.
6. Merumuskan strategi untuk mengatur isu-isu.
7. Menganalisa ulang dan mengadopsi perencanaan strategis.
8. Menetapkan sebuah visi organisasi yang efektif
9. Mengembangkan proses implementasi yang efektif.
10. Menguji kembali proses perencanaan strategis.

Ada beberapa konsep utama yang menegaskan makna dan keberhasilan dari sebuah perencanaan strategis (**Kaye et al, 2005**), yaitu sebagai berikut :

- A.** Prosesnya strategis sebab melibatkan bagaimana memilih cara terbaik untuk menanggapi keadaan lingkungan yang dinamis dan terkadang tidak bersahabat.
- B.** Perencanaan strategis itu sistematis
- C.** Perencanaan strategis itu mencakup pemilihan prioritas tertentu – membuat keputusan tentang tujuan dan sarana, baik dalam jangka panjang maupun pendek.
- D.** Proses itu tentang membangun komitmen.

Jika dikaitkan dengan penulisan ini, maka rencana strategis dalam hal ini adalah perencanaan strategis penanggulangan tindak kekerasan yang terjadi di dalam suatu institusi yang melaksanakan penahanan dan pembedaan yakni Rutan Klas I Jakarta Pusat.

### 3.4.2. Perencanaan Bagian Penting Dalam Penyusunan Strategi

Organisasi yang ingin tetap bertahan, berkembang dan mampu melaksanakan tugas-tugas yang bermanfaat dan penting harus tanggap terhadap perubahan-perubahan lingkungan yang terjadi. Tanggapan tersebut antara lain tercermin pada perumusan rencana strategis yang tidak jarang menuntut adanya perubahan fokus organisasi.

Penyusunan suatu perencanaan membutuhkan suatu pengamatan yang jeli dan cermat terhadap aspek-aspek yang ada di sekitar organisasi. Karena aspek-aspek tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung akan dapat mempengaruhi perencanaan strategis bagi suatu organisasi. Dengan perencanaan yang baik, maka suatu organisasi dapat merumuskan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, agar diketahui ke arah mana yang terbaik organisasi itu harus melangkah. Dalam penyusunan perencanaan kita mengidentifikasi faktor-faktor strategis apa saja yang kita miliki seperti kekuatan (*Strength*), kelemahan (*Weakness*), kesempatan (*Opportunity*) dan ancaman (*Threats*), atau yang lazim disebut analisa **SWOT**. Sehingga dapat diketahui kemampuan serta potensi sebenarnya dari suatu organisasi. Seperti yang diungkapkan oleh **Burhan (1989)**, "Sistem perencanaan strategis diperlukan untuk menyusun dan melaksanakan strategi-strategi yang dibutuhkan". Diutarakan pula oleh **Hunger (Wheelen, 2007)**, bahwa strategi adalah suatu perumusan perencanaan yang komprehensif yang digunakan dalam mencapai misi dan tujuannya.

Demikian pula dengan yang diungkapkan oleh **Chandler (Salusu, 2005)**, bahwa strategi adalah pola tujuan atau sasaran yang dinyatakan dengan sedemikian rupa, formulasi strategi adalah prakiraan mengenai lingkungan serta identifikasi mengenai ancaman dan peluang yang ada. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa suatu perencanaan adalah bagian yang penting dalam suatu strategi di mana dengan perencanaan yang baik dan tepat maka kemungkinan strategi tersebut dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien akan semakin lebih besar.

### 3.4.3. Perencanaan dan Upaya Penanggulangan Tindak Kekerasan

Dalam upaya penanggulangan gangguan keamanan di dalam Rutan/Lapas, dibutuhkan perencanaan yang baik agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan efektif dan efisien serta hasil yang dicapai sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Yang dimaksud dengan hal gangguan keamanan dan ketertiban di sini adalah tindak

kekerasan yang terjadi di kalangan tahanan dan narapidana. Dalam perencanaan penanggulangan tindak kekerasan perlu diperhatikan juga tentang bagaimana pencegahan suatu tindak kekerasan (*preventive*) hingga upaya penindakan segala bentuk tindak kekerasan (*repressive*) agar gangguan keamanan yang berupa kekerasan tersebut dapat diminimalisir sekecil mungkin agar jatuhnya korban yang lebih banyak dapat dihindari.

Dalam pelaksanaan upaya menanggulangi suatu tindak kekerasan yang terjadi di dalam suatu komunitas masyarakat (dalam hal ini adalah lingkungan Rutan Klas I Jakarta Pusat), seharusnya masing-masing anggota masyarakat Rutan, khususnya para tahanan dan narapidana, memiliki kesadaran akan pentingnya keamanan dan kenyamanan hidup di mana dengan rasa aman dan nyaman tersebut maka kelangsungan hidup dapat berjalan dengan baik dan harmonis. Sebagai salah satu bentuk upaya penanggulangan tersebut diantaranya adalah dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM) setiap anggota masyarakat yang ada tanpa membedakan satu dengan yang lainnya. Dengan penghormatan terhadap HAM yang baik diharapkan setiap individu maupun kelompok masyarakat tersebut mampu menempatkan diri mereka masing-masing dengan tanpa melanggar HAM orang lain seperti dengan berbuat sesuatu yang dapat dikategorikan sebagai kekerasan misalnya mencaci maki, menganiaya dan sebagainya, serta menanamkannya dalam diri mereka untuk dapat dimulai dari diri masing-masing sebagai bagian dari komunitas terkecil.

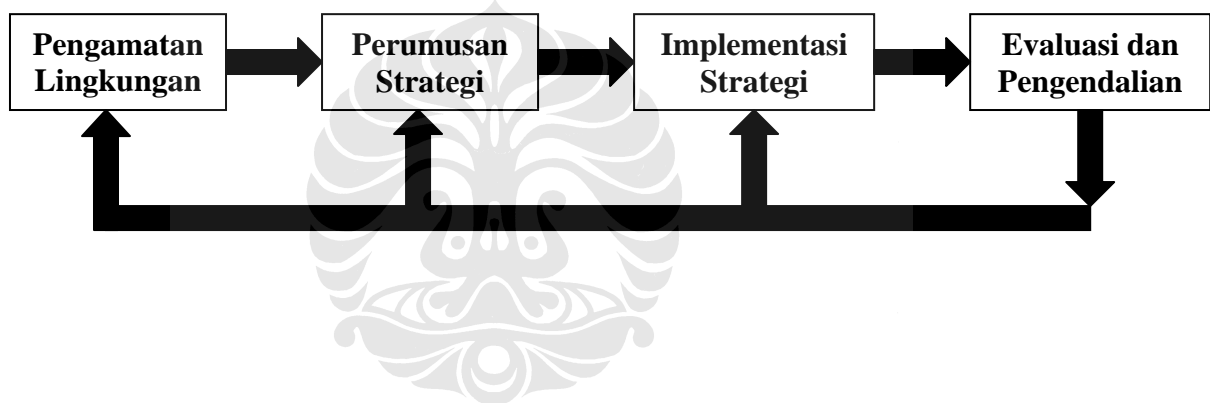
Lebih jauh, selain daripada hal-hal tersebut diatas, diperlukan suatu strategi penanganan yang efektif dan efisien agar tercapai suatu kondisi yang aman dan tentram dalam lingkungan Rutan Klas 1 Jakarta Pusat. Dalam perumusan strategi tersebut, agar tujuan dapat tercapai dengan efektif dan efisien, diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

- A. Mengklarifikasi misi dan tujuan Rutan Klas 1 Jakarta Pusat
- B. Mengidentifikasi peraturan-peraturan dan ketetapan-ketetapan yang telah ada, sebagai batasan daripada perencanaan dan upaya penanggulangan tindak kekerasan yang akan dilakukan.
- C. Mengidentifikasi faktor-faktor pemicu terjadinya tindak kekerasan dalam Rutan Klas 1 Jakarta Pusat.
- D. Menguji lingkungan internal maupun eksternal Rutan Klas 1 Jakarta Pusat untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, kesempatan dan ancaman.

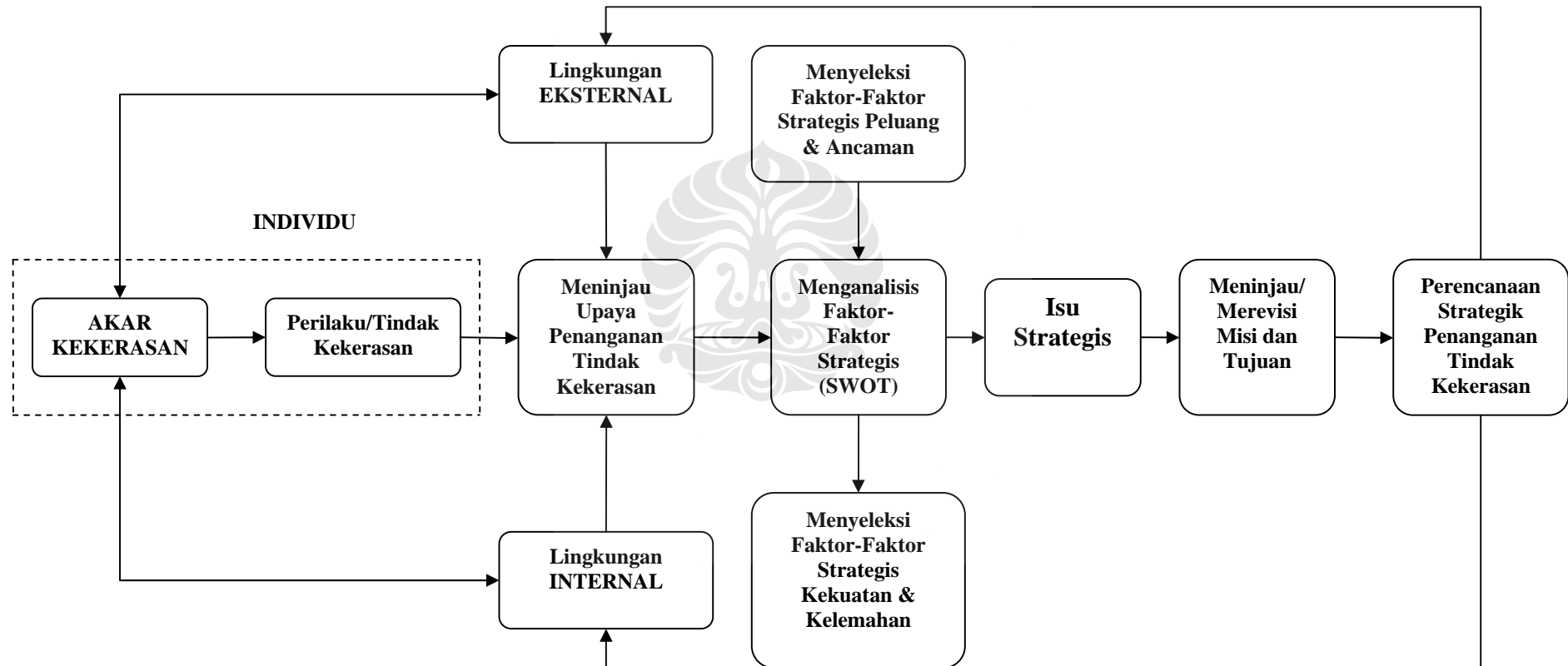
- E. Menganalisa ulang dan mengadopsi rencana strategis
- F. Mengembangkan proses implementasi yang efektif pada Rutan Klas 1 Jakarta Pusat terutama pada sektor-sektor keamanannya.
- G. Menguji kembali proses perencanaan strategis tersebut

Proses perencanaan strategis tersebut harus disusun secara sistematis dan data-data yang dikumpulkan diuji kebenarannya. Dengan upaya-upaya yang dilakukan diatas diharapkan dapat membantu menciptakan iklim yang kondusif di dalam Rutan sehingga dapat menekan segala bentuk gangguan keamanan dan ketertiban yang mungkin terjadi seperti suatu tindak kekerasan antar penghuni. Dalam Bagan di balik ini digambarkan proses perencanaan strategik penanganan tindak kekerasan:

**Gambar 13: Elemen-elemen Dasar dari Proses Manajemen Strategis**



**Gambar 14:**  
**PROSES PERENCANAAN STRATEGIK PENANGANAN TINDAK KEKERASAN**



Proses manajemen strategis menurut Wheelen (Wheelen et al, 2003) meliputi empat elemen dasar: **(1) pengamatan lingkungan, (2) perumusan strategi, (3) implementasi strategi, dan (4) evaluasi dan pengendalian.**

Analisa situasi merupakan awal proses perumusan strategi. Selain itu, analisis situasi juga mengharuskan para manajer strategis untuk menemukan kesesuaian strategis antara peluang-peluang eksternal dan kekuatan-kekuatan internal, disamping memperhatikan ancaman-ancaman eksternal dan kelemahan-kelemahan internal (Wheelen, 2007).

Faktor-faktor yang paling penting untuk masa depan perusahaan disebut faktor-faktor strategis dan diringkas dengan singkatan **S.W.O.T** yang berarti **Strength** (kekuatan), **Weakness** (kelemahan), **Opportunities** (kesempatan), dan **Threats** (ancaman). Setelah mengidentifikasi faktor-faktor strategis, manajemen mengevaluasi interaksinya dan menentukan misi perusahaan yang sesuai. Langkah pertama dalam merumuskan strategi adalah pernyataan misi, yang berperan penting dalam menentukan tujuan, strategi, dan kebijakan perusahaan. Perusahaan mengimplementasi strategi dan kebijakan tersebut melalui program, anggaran dan prosedur.

Mengingat bahwa SWOT adalah akronim untuk Strengths, Weaknesses, Opportunities, dan Threats dari organisasi, yang semuanya merupakan faktor-faktor strategis. Jadi, analisis SWOT harus mengidentifikasi kompetensi langka (distinctive competence) organisasi – yaitu keahlian tertentu dan sumber-sumber yang dimiliki oleh sebuah perusahaan dan cara unggul yang mereka gunakan. Kompetensi yang langka kadang-kadang dianggap sekumpulan kapabilitas inti (core capabilities) – kapabilitas yang secara strategis membuat sebuah organisasi menjadi berbeda. Penggunaan kompetensi langka perusahaan secara tepat (kapabilitas inti) akan memberikan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan.



## A. Analisis Eksternal

Lingkungan eksternal terdiri dari variabel-variabel (kesempatan dan ancaman) yang berada di luar organisasi dan tidak secara khusus ada dalam pengendalian jangka pendek dari manajemen puncak. Variabel-variabel tersebut membentuk keadaan dalam organisasi di mana organisasi ini hidup. Lingkungan eksternal memiliki dua bagian: lingkungan kerja dan lingkungan sosial.

1. **Lingkungan kerja** terdiri dari elemen-elemen atau kelompok yang secara langsung berpengaruh atau dipengaruhi oleh operasi-operasi utama organisasi.
2. **Lingkungan sosial** terdiri dari kekuatan umum – kekuatan itu tidak berhubungan langsung dengan aktivitas-aktivitas jangka pendek organisasi tetapi dapat dan sering mempengaruhi keputusan-keputusan jangka panjang.

### Lingkungan Eksternal Rutan Klas 1 Jakarta Pusat:

#### 1. Lingkungan Kerja

- a. Dept. hukum dan hak asasi manusia
- b. Ditjen Pemasyarakatan
- c. Kepolisian
- d. Kejaksaan
- e. Pengadilan
- f. Ideologi / politik
- g. Sikap pemerintah terhadap Tahanan/Narapidana

#### 2. Lingkungan Sosial

- a. Keluarga dan kerabat para Tahanan/Narapidana
- b. Lembaga-lembaga sosial
- c. Lembaga-lembaga keagamaan
- d. Tingkat harapan hidup
- e. Tingkat persaingan hidup di Jakarta
- f. Sikap masyarakat terhadap Tahanan/Narapidana maupun mantan Tahanan/Narapidana

## B. Analisis Internal

Lingkungan internal terdiri dari variabel-variabel (kekuatan dan kelemahan) yang ada dalam organisasi tetapi biasanya tidak dalam pengendalian jangka pendek dari manajemen puncak. Variabel-variabel tersebut membentuk suasana di mana

pekerjaan dilakukan. Variabel-variabel itu meliputi struktur, budaya, dan sumber daya organisasi.

1. **Struktur** adalah cara bagaimana perusahaan diorganisasikan yang berkenaan dengan komunikasi, wewenang, dan arus kerja. Struktur sering disebut rantai perintah dan digambarkan secara grafis dengan menggunakan bagan organisasi.
2. **Budaya** adalah pola keyakinan, pengharapan, dan nilai-nilai yang dibagikan oleh anggota organisasi. Norma-norma organisasi secara khusus memunculkan dan mendefinisikan perilaku yang dapat diterima anggota dari manajemen puncak sampai karyawan operatif.
3. **Sumber daya** adalah aset yang merupakan bahan baku bagi produksi barang dan jasa organisasi. Aset meliputi keahlian orang, kemampuan, dan bakat manajerial, seperti aset keuangan dan fasilitas organisasi dalam wilayah fungsional.

#### **Lingkungan Internal Rutan Klas 1 Jakarta Pusat:**

1. **Struktur**
  - a. Bentuk Organisasi
  - b. Pembagian tugas dan tanggung jawab
  - c. Peraturan-peraturan
  - d. Stabilitas
  - e. Kekuatan kelompok-kelompok (departemen maupun kelompok Tahanan/Narapidana)
  - f. Infrastruktur arus informasi
2. **Budaya**
  - a. Kebiasaan, norma dan nilai-nilai dalam Rutan/Lapas
  - b. Bahasa umum dan bahasa khusus dalam Rutan/Lapas
  - c. Demografi
  - d. Agama / Kepercayaan
  - e. Sikap terhadap orang asing
  - f. Tingkat pendidikan
  - g. Gaya hidup (sehubungan dengan tingkat ekonomi)
3. **Sumber Daya Organisasi**
  - a. Para Petugas

- b. Para Tahanan/Narapidana
- c. Sarana dan Prasarana
  - 1) Bangunan
  - 2) Pangan
  - 3) Sarana Keamanan
  - 4) Sarana Kesehatan
  - 5) Sarana Ibadah
  - 6) Listrik dan Air
- d. Teknologi

Satu hasil yang diinginkan dari menganalisis faktor-faktor strategis adalah mengidentifikasi ceruk yang menjanjikan, yang organisasi dapat menggunakan kompetensi langkanya semaksimal mungkin. Ceruk yang menjanjikan (*“propitious niche”*) adalah kekuatan bersaing khusus yang dimiliki perusahaan yang sangat sesuai dengan lingkungan internal dan eksternalnya, yang tidak mungkin dihadapi oleh perusahaan lain.

Tujuan utama dalam manajemen strategis adalah memadukan variabel-variabel internal perusahaan untuk memberikan kompetensi unik, yang memungkinkan perusahaan untuk mencapai keunggulan kompetitif secara terus-menerus, sehingga menghasilkan laba. Dalam menganalisis berbagai faktor dalam lingkungan organisasi, dideteksi adanya beberapa dimensi yaitu seperti diutarakan oleh **Aldrich (Salusu, 1996)**:

1. Dimensi kapasitas, yaitu sejauh mana lingkungan mampu mensuplai organisasi dengan sumber daya yang sangat diperlukan.
2. Dimensi stabilitas-instabilitas, yaitu tingkat dan kecepatan perubahan pada komponen penting atau proses-proses perubahan dalam lingkungan.
3. Dimensi konsentrasi-tersebar, yaitu sejauh dan pada tingkat mana komponen-komponen penting dalam lingkungan itu terpisah, menyatu, bergabung atau berdekatan satu dengan yang lain.
4. Domain konsensus-disensus, yaitu sejauh mana domain organisasi (lokasi kegiatan, fungsi-fungsi utama, klien atau konsumen yang dilayani) dapat diterima secara umum, diperdebatkan, dan kemudian ditolak.

5. Dimensi kegoncangan, yaitu sejauh mana perubahan pada satu komponen penting dalam lingkungan menciptakan perubahan pada komponen lainnya sehingga kemudian menyebar dan dapat dirasakan oleh organisasi.

Di pihak lain dikenal tiga dimensi, yaitu dimensi tersedianya sumber daya yang mempersoalkan ada tidaknya sumber daya lingkungan yang diperlukan oleh organisasi; kompleksitas, yang melihat bagaimana tingkat homogenitas dan konsentrasi dari lingkungan tersebut; dan terakhir adalah dimensi dinamisme, yaitu pada tingkat mana yang penuh kegoncangan (**Dess in Salusu, 1996**).

Di antara ketiga elemen penting yaitu elemen-elemen dari lingkungan eksternal, lingkungan internal, serta "misi, tujuan dan sasaran" harus terdapat titik pertemuan yang tumpang tindih yang disebut titik singgung. Menurut **Barry (Salusu, 1996)**, apabila tumpang tindih yang tampak antara misi organisasi, kapabilitasnya, kebutuhan, serta peluang yang berkaitan dengan bidang pelayanan anda tidak cukup maka organisasi anda akan berada dalam kesulitan.

- **Misi** organisasi adalah tujuan atau alasan mengapa organisasi hidup. Pernyataan misi yang disusun dengan baik mendefinisikan tujuan mendasar dan unik yang membedakan suatu perusahaan/organisasi dengan perusahaan/organisasi lain dan mengidentifikasi jangkauan operasi perusahaan/organisasi dalam produk yang ditawarkan dan pasar yang dilayani. Misi mengembangkan harapan pada karyawan dan mengkomunikasikan pandangan umum untuk kelompok pemegang saham utama dalam lingkungan kerja perusahaan/ organisasi. Misi memberitahukan *siapa kita dan apa yang kita lakukan*.
- **Tujuan** adalah hasil akhir aktivitas perencanaan. Tujuan merumuskan apa yang akan diselesaikan dan kapan akan diselesaikan, dan sebaiknya diukur jika memungkinkan. Pencapaian tujuan perusahaan merupakan hasil dari penyelesaian misi.

### C. Pembuatan Matriks SWOT (TOWS)

Setelah dibahas bagaimana organisasi menilai situasinya dan juga telah meninjau strategi-strategi organisasi yang tersedia, tugas selanjutnya adalah mengidentifikasi cara-cara alternatif sehingga organisasi dapat menggunakan kekuatan-kekuatan khususnya untuk menggunakan kesempatan atas peluang-

peluang atau untuk menghindari ancaman-ancaman, dan mengatasi kelemahan-kelemahannya. Matriks SWOT (dikenal juga dengan TOWS) menggambarkan bagaimana manajemen dapat mencocokkan peluang-peluang dan ancaman-ancaman eksternal yang dihadapi suatu perusahaan tertentu dengan kekuatan dan kelemahan internalnya, untuk menghasilkan empat rangkaian alternatif strategis. Metode ini mengarah pada *brainstorming* untuk menciptakan strategi-strategi alternatif yang mungkin tidak terpikirkan oleh manajemen. Hal ini mendorong manajer strategis untuk menciptakan baik strategi-strategi pertumbuhan maupun pengurangan.

### MATRIX SWOT (TOWS)

FAKTOR-FAKTOR INTERNAL (IFAS) / FAKTOR-FAKTOR EKSTERNAL (EFAS)	Kekuatan (S) Daftarkan 5-10 kekuatan internal di sini	Kelemahan (W) Daftarkan 5-10 kelemahan internal di sini
<b>Peluang (O)</b> Daftarkan 5-10 peluang eksternal di sini	<b>Strategi (SO)</b> Buat strategi di sini yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang	<b>Strategi (WO)</b> Buat strategi di sini yang memanfaatkan peluang untuk mengatasi kelemahan
<b>Ancaman (T)</b> Daftarkan 5-10 ancaman eksternal di sini	<b>Strategi (ST)</b> Buat strategi di sini yang menggunakan kekuatan untuk menghindari ancaman	<b>Strategi (WT)</b> Buat strategi di sini yang meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman

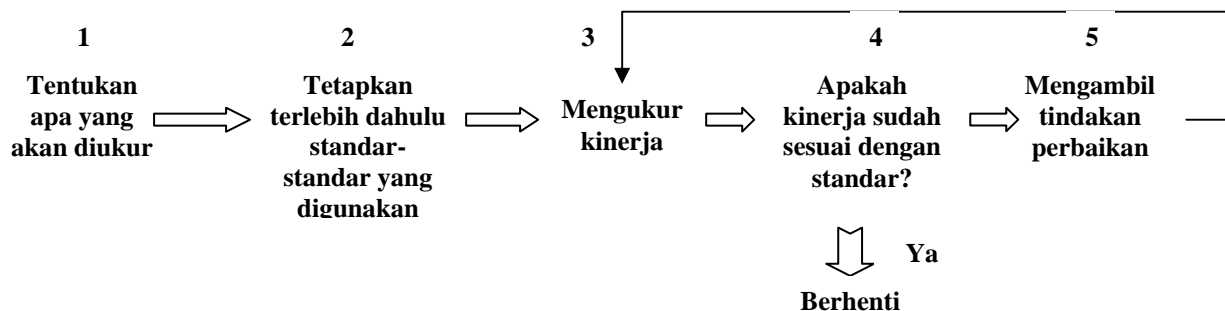
(Wehrich in Wheelen et al, 2003)

#### D. Perumusan Strategi

Perumusan strategi adalah pengembangan rencana jangka panjang untuk manajemen efektif dari kesempatan dan ancaman lingkungan, dilihat dari kekuatan dan kelemahan perusahaan. Perumusan strategi meliputi menentukan misi perusahaan, menentukan tujuan-tujuan yang dapat dicapai, pengembangan strategi, dan penetapan pedoman kebijakan.

Strategi perusahaan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana perusahaan/organisasi akan mencapai misi dan tujuannya. Strategi akan memaksimalkan keunggulan kompetitif dan meminimalkan keterbatasan bersaing.

## E. Proses Evaluasi dan Kontrol



### Langkah-langkah dalam proses evaluasi dan kontrol:

1. **Menentukan apa yang akan diukur:** Manajer puncak dan manajer operasional perlu menetapkan proses implementasi dan hasil-hasil yang akan dipantau dan dievaluasi. Proses dan hasil harus dapat diukur dalam cara yang obyektif dan konsisten. Fokus ada pada elemen paling penting dalam sebuah proses-elemen yang bertanggung jawab terhadap proporsi terbesar dalam biaya atau jumlah terbesar masalah yang ditemui. Pengukuran harus dapat diketahui dengan mudah oleh seluruh wilayah penting, bagaimanapun sulitnya. Oleh karena kualitas sering diukur, maka langkah ini sangat penting dalam program TQM.
2. **Menetapkan standar kinerja:** Standar yang digunakan untuk mengukur kinerja merupakan ekspresi mendetail dari sasaran strategis. Standar adalah ukuran atas hasil kinerja yang dapat diterima. Setiap standar biasanya memasukkan rentang toleransi, yang menentukan penyimpangan yang dapat diterima. Standar dapat disusun tidak hanya untuk output akhir, tetapi juga untuk tahap di tengah-tengah proses produksi.
3. **Mengukur kinerja aktual dengan standar yang telah ditetapkan:** Pengukuran harus dilakukan pada saat awal penentuan standar.
4. **Membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditetapkan:** Jika hasil aktual berada dalam rentang toleransi, proses pengukuran berhenti di sini.
5. **Mengambil tindakan perbaikan:** Jika hasil aktual berada di luar rentang toleransi yang ditetapkan, maka harus diambil sebuah tindakan untuk

memperbaiki penyimpangan tersebut. Beberapa hal berikut ini harus diperhatikan sebelum mengambil tindakan perbaikan:

- a. Apakah penyimpangan yang terjadi hanya merupakan suatu kebetulan?
- b. Apakah proses yang sedang berjalan tidak berfungsi dengan baik?
- c. Apakah proses yang sedang berjalan tidak sesuai dengan upaya pencapaian standar yang diinginkan? Tindakan harus diambil tidak hanya untuk memperbaiki penyimpangan yang terjadi, tetapi juga untuk mencegah berulangnya penyimpangan tersebut.

Pengendalian manajemen adalah suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar kinerja dengan sasaran perencanaan, mendesain sistem umpan balik informasi, membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditetapkan, menentukan apakah terdapat penyimpangan dan mengukur signifikansi penyimpangan tersebut, dan mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan yang sedang digunakan sedapat mungkin secara lebih efisien dan efektif guna mencapai sasaran perusahaan (**Yahya, 2006**).

Berdasarkan batasan di atas, terdapat 4 langkah dalam pengendalian, yaitu:

1. Menetapkan standar dan metode untuk pengukuran kinerja (*establish standard and methods for measuring performance*).
2. Mengukur kinerja (*measure the performance*).
3. Membandingkan kinerja sesuai dengan standar (*compare the performance match with the standard*)
4. Mengambil tindakan perbaikan (*take corrective action*)

Pengendalian yang efektif berarti pengendalian yang tepat sesuai dengan proses yang dilalui tanpa menyimpang dari sistem yang dianut sehingga tahapan yang dilaluinya benar. Secara umum pengendalian yang efektif mempunyai karakteristik sebagai berikut (**Yahya, 2006**):

1. Akurat (*Accurate*)
2. Tepat waktu (*Timely*)
3. Objektif dan komprehensif (*Objective and Comprehensible*)
4. Dipusatkan pada tempat pengendalian strategis (*focused on Strategic Control Points*)
5. Secara ekonomi realistis (*Economically Realistic*)

6. Secara organisasi realistis (*Organizationally Realistic*)
7. Dikoordinasikan dengan arus pekerjaan organisasi (*Coordinated with the Organizations Work Flow*)
8. Fleksibel (*Flexible*)
9. Preskriptif dan operasional (*Prescriptive and Operational*)
10. Diterima para anggota organisasi (*Accepted by Organization Members*)

Dalam upaya penanggulangan tindak kekerasan pada Rutan Klas 1 Jakarta Pusat, pengendalian terhadap upaya-upaya yang telah dilakukan sangatlah penting. Tujuannya adalah agar upaya-upaya yang dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, tepat guna serta untuk mengidentifikasi kekurangan-kekurangan yang ada sebagai bahan masukan pada perencanaan strategi

#### **F. Mengukur Kinerja**

Pengukuran-pengukuran yang digunakan untuk menilai kinerja tergantung pada bagaimana unit organisasi akan dinilai dan bagaimana sasaran akan dicapai. Sasaran yang ditetapkan pada tahap perumusan strategi dalam sebuah proses manajemen strategis (dengan memperhatikan profitabilitas, pangsa pasar, dan pengurangan biaya, dari berbagai ukuran lainnya) harus betul-betul digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan selama masa implementasi strategi.

Para manajer dapat menetapkan berbagai pengendalian untuk tetap memfokuskan diri mereka, baik dalam aktivitas yang menghasilkan kinerja (perilaku) atau dalam hasil aktual kinerja (output). **Pengendalian terhadap perilaku** menunjukkan bagaimana sesuatu harus dilakukan melalui serangkaian kebijakan, aturan, prosedur standar operasi, dan perintah dari atasan. **Pengendalian terhadap output** menunjukkan apa yang harus dicapai dengan memfokuskan pada hasil akhir perilaku tertentu melalui penggunaan sasaran dan target kinerja atau tonggak peristiwa penting. Pengendalian terhadap perilaku dan output adalah hal yang tidak dapat saling menggantikan. Pengendalian terhadap perilaku (seperti prosedur organisasi, permintaan potensial, bekerja tepat waktu) adalah metode yang paling tepat pada situasi di mana hasil yang diperoleh sulit untuk diukur dan ada hubungan sebab-akibat antara aktivitas dan hasil yang diperoleh. Pengendalian terhadap output) seperti kuota penjualan, sasaran khusus dalam upaya memperoleh laba atau pengurangan biaya, dan survai terhadap kepuasan pelanggan) merupakan metode yang paling sesuai untuk situasi di mana ada kesepakatan khusus tentang



pengukuran output dan tidak ada hubungan sebab-akibat yang jelas antara hasil yang diperoleh dan aktivitas yang dilakukan. Secara umum, pengukuran terhadap output memberikan kebutuhan pengendalian terhadap organisasi secara keseluruhan, sementara pengukuran terhadap perilaku memberikan informasi pada manajer sebagai individu.

### 3.5. Analisa Resiko

Risiko sering diartikan sebagai ketidakpastian (*uncertainty*). Dalam kehidupan sehari-hari, risiko dapat menyebabkan masalah tetapi dapat juga mendatangkan peluang yang menguntungkan bagi institusi maupun orang per orang. Risiko dan ketidakpastian seringkali digunakan dengan arti yang sama, penggunaannya saling dipertukarkan dengan maksud yang sama atau *interchangeably* (Siahaan, 2007).

Hinsa Siahaan (2007) dalam bukunya “Manajemen Risiko” membagi risiko menjadi 2 jenis, yaitu:

#### A. Risiko Murni

Suatu risiko disebut sebagai pure risk atau risiko murni jika suatu ketidakpastian terjadi, maka kejadian tersebut pasti menimbulkan kerugian.

#### B. Risiko Spekulasi

Merupakan kebalikan dari risiko murni, yaitu ketidakpastian apakah akan terjadi untung atau kerugian.

### 3.6. Hasil-Hasil Penelitian Yang Relevan

Berikut ini disampaikan beberapa hasil penelitian yang dianggap relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Dianggap relevan karena menggunakan tempat/lokasi yang sama dalam penelitian (Rutan Klas 1 Jakarta Pusat) atau memiliki persamaan objek penelitian. Namun demikian, fokus pembahasan serta teknik analisa berbeda antara satu dengan yang lainnya.

**A. Andi Yudho Sutijono**, Faktor-Faktor Penyebab Konflik Kekerasan dan Upaya Pencegahannya (Studi Kasus di Rumah Tahanan Negara Klas 1

Jakarta Pusat), Tesis, Kajian Manajemen Penjara, Program Studi Pengkajian Ketahanan Nasional Pasca Sarjana UI, Jakarta, 2007.

Relevansi dengan tesis ini, antara lain:

1. Bahwa dalam penelitian tersebut ditemukan bahwa konflik kekerasan pada Rutan Klas 1 Jakarta Pusat dibagi ke dalam 3 kelompok jenis dengan faktor-faktor penyebabnya, antara lain:

a. Konflik kekerasan individual

- 1) Perbedaan keinginan dan kepentingan komunitas penghuni Rutan dengan keinginan dan kepentingan para penegak hukum.
- 2) Adanya keinginan untuk dapat memenuhi berbagai kebutuhan dalam diri para tahanan dan narapidana, mulai dari kebutuhan primer biologis sampai dengan kebutuhan yang paling tinggi, namun tidak memiliki sumber-sumber pendukung untuk dapat merealisasikannya.
- 3) Adanya keinginan untuk memperoleh ruang pribadi (privacy), namun tidak memiliki tempat yang bisa dipergunakan secara khusus bagi dirinya sendiri, selain karena kepadatan penghuni (overkapasitas), juga Rutan secara umum tidak menyediakan ruang pribadi bagi Tahanan dan Narapidanan secara personal.
- 4) Terdapat suatu keinginan berkumpul atau sering bertemu dengan keluarga dan kerabat, namun ternyata keluarga tidak memiliki kesempatan untuk dapat berkunjung setiap hari meskipun sebenarnya Rutan membuka kunjungan setiap harinya sesuai jadwal besukan.
- 5) Keinginan untuk dapat membina relasi seksual dengan pasangan, namun tidak memiliki kesempatan, ketersediaan tempat atau media (sarana) pendukung lainnya untuk dapat mewujudkannya.
- 6) Keinginan untuk dapat menjalani kehidupan yang lebih aman dalam keseharian tetapi sebaliknya sering mendapatkan gangguan yang memicu pertentangan.

- 7) Keinginan untuk dapat mengatur diri sendiri namun peluang dan kesempatan untuk mewujudkannya, karena kehidupan para Tahanan dan Narapidana telah diikat oleh aturan dan peraturan yang baku dan berlaku secara umum bagi penghuni Rutan.
  - 8) Adanya keinginan untuk dapat bersosialisasi secara lebih baik dengan orang lain, namun ternyata para penghuni Rutan memiliki suatu keuntungan dari proses interaksi sosial tersebut.
  - 9) Keinginan untuk dapat masuk dalam kelompok tertentu, namun tidak memenuhi persyaratan yang telah diberlakukan dan menjadi keharusan dalam masing-masing kelompok tersebut.
  - 10) Terdapatnya perbedaan latar belakang diantara para Tahanan dan Narapidana, baik latar belakang pendidikan, kesukaan, budaya, sosial ekonomi, bahkan tempat atau wilayah kejadian perkara (TKP) yang mempengaruhi sikap dan perilaku keseharian para penghuni Rutan.
- b. Konflik kekerasan kelompok
- 1) Terancamnya keberadaan suatu kelompok tertentu oleh kelompok lainnya yang berbeda kepentingan dengan kelompok tersebut.
  - 2) Adanya kekhawatiran kelompok tertentu bahwa kelompok lain akan mengganggu aktivitas atau kegiatan kelompok mereka.
  - 3) Adanya ketidak sesuaian tata cara dalam berkomunikasi antara suatu kelompok dengan kelompok yang lain.
  - 4) Adanya upaya kelompok tertentu untuk menyerang kelompok lain karena kelompok lain mencoba atau melakukan penekanan-penekanan atau berbagai bentuk intervensi terhadap kelompok mereka
  - 5) Adanya kecemburuan atas keadaan sosial ekonomi kelompok lain.

- 6) Terbentuk dan semakin berkembangnya kelompok-kelompok baru yang memiliki kesamaan latar belakang dan atau yang memiliki perbedaan latar belakang dengan kelompok mereka.

c. Konflik kekerasan massal

- 1) Adanya perasaan tertekan berkepanjangan dalam diri perorangan ataupun kelompok memudahkan mereka terpengaruh oleh isu-isu yang dapat menguntungkan mereka.
- 2) Adanya ketidakpercayaan dan rasa permusuhan yang terus terjadi di antara beberapa kelompok yang berbeda secara bersamaan.
- 3) Terdapatnya kesenjangan hubungan sosial yang melahirkan kelompok-kelompok kecil yang sifatnya eksklusif (tertutup) yang menyebabkan struktur sosial penghuni semakin terkotak-kotak.
- 4) Kurangnya konsistensi dalam menerapkan aturan dan peraturan sehingga sanksi atas pelanggaran semakin longgar.
- 5) Adanya pembedaan perlakuan kepada para tahanan dan narapidana yang dilandaskan pada status sosial ekonomi, bukan dengan karakteristik atau kepribadian masing-masing tahanan dan narapidana.
- 6) Ketersediaan layanan dalam berbagai aspek yang kurang memadai dan terdapatnya perbedaan kesempatan untuk mendapatkan layanan yang sesuai dengan kebutuhan para tahanan dan narapidana secara umum.
- 7) Ketersediaan akan pemenuhan kebutuhan dasar biologis (makan dan minum) yang kurang memadai.
- 8) Sistem kontrol atau sistem kendali tidak cukup memadai baik dari sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya sehingga peluang untuk melakukan aksi kekerasan cukup terbuka bagi komunitas tahanan dan narapidana.

2. Tahapan dalam menyelesaikan suatu masalah konflik dengan kekerasan yang terjadi antar Tahanan/Narapidana dalam Rutan Klas 1 Jakarta Pusat:
  - a. Identifikasi dan Analisa Masalah  
Proses untuk mengetahui penyebab timbulnya konflik dengan kekerasan tersebut. Informasi berupa fakta dan perasaan-perasaan para penghuni yang terlibat langsung maupun tidak langsung dengan konflik tersebut dikumpulkan, kemudian dianalisa motif dan modusnya.
  - b. Tindak Lanjut
    - 1) Pelibatan Mediator
    - 2) Kompromi
    - 3) Bimbingan dan Pengarahan
    - 4) Pemberian Ganjaran
3. Salah satu isu strategis yang muncul dalam penelitian ini adalah adanya kebutuhan akan pengembangan metode pengelolaan konflik yang sudah ada. Selain daripada itu, penulis mencoba memberikan saran bagi pengembangan metode yang bertujuan untuk mencegah dan menekan terjadinya konflik kekerasan sekaligus memudahkan upaya penyelesaiannya, antara lain:
  - a. Upaya pencegahan konflik kekerasan  
Bertujuan menghindari timbulnya suatu konflik yang lebih luas dan mencegah munculnya perilaku kekerasan.
  - b. Identifikasi perubahan situasi  
Mewaspada perubahan yang terjadi dalam lingkungan kehidupan Tahanan/Narapidana secara periodik sekaligus melakukan penanganan penyebab dan berbagai pemicu terjadinya konflik kekerasan.
  - c. Identifikasi daerah-daerah rawan terjadinya konflik  
Meningkatkan usaha identifikasi terhadap daerah-daerah rawan terjadinya konflik.
  - d. Identifikasi aktor penggerak konflik kekerasan

Meningkatkan indentifikasi terhadap motor penggerak terjadinya aksi tindak kekerasan yang menggerakkan aksi-aksi konflik kekerasan.

e. Peningkatan dan pengembangan sistem kontrol

Sistem kendali dalam pengamanan adalah suatu hal yang sangat penting karena pengamanan dan kenyamanan dalam suatu lingkungan akan dapat tercapai jika ada sistem kendali yang baik.

f. Pengelolaan konflik sebagai metode penyelesaian

Pengelolaan yang dimaksudkan adalah bertujuan untuk proses penyelesaian dan menghindarkan kekerasan dengan mendorong perubahan perilaku yang positif bagi pihak-pihak yang terlibat.

g. Peningkatan profesionalisme

Peningkatan koordinasi dan profesionalisme kerja di tiap-tiap unit kerja di dalam lingkungan kerja Rutan.

**B. Agus Purwa Saptono, SH**, Peran Polda Maluku Utara Dalam Mencegah Konflik Kekerasan (Studi Kasus Pasca Konflik Maluku Utara 1999), Tesis, Perdamaian dan Resolusi Konflik, Program Studi Ketahanan Nasional UGM, Yogyakarta, 2007.

Penelitian ini menganalisa peran Polda Maluku Utara dalam mencegah konflik kekerasan agar kejadian konflik kekerasan tahun 1999 tidak terulang dan bereskalasi kembali menjadi potensi yang merugikan banyak pihak.

Isu penting yang disimpulkan setelah proses analisis antara lain:

1. Situasi di wilayah propinsi Maluku Utara bisa dikategorikan sebagai situasi pasca konflik di mana situasi diselesaikan dengan cara mengakhiri berbagai konfrontasi kekerasan, ketegangan berkurang dan hubungan mengarah ke lebih normal diantara pihak-pihak.
2. Potensi konflik kekerasan yang mungkin terjadi, antara lain:
  - a. Rencana Pilkada Gubernur dan Bupati Halmahera Tengah yang akan dilaksanakan pada awal bulan Juni 2007.

- b. Konflik pemekaran wilayah antara Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat dengan Pemerintah Halmahera Utara khususnya menyangkut status 6 desa.
3. Pihak Polda Maluku Utara telah melakukan berbagai upaya pencegahankonflik melalui berbagai program rutin maupun operasi khusus kepolisian, diantaranya:
  - a. Deteksi dini yang dilakukan oleh fungsi intelijen.
  - b. Membentuk forum silaturahmi bersama.
  - c. Menjalin kemitraan dengan para tokoh masyarakat dan instansi terkait dan melibatkan mereka dalam proses penyelesaian masalah yang ada di masyarakat.
4. Secara teoritis langkah yang dilakukan oleh Polda Maluku Utara tersebut sudah tepat. Dalam teori polisi dan manajemen konflik disebutkan bahwa upaya pencegahan konflik dapat dilakukan dengan berbagai aspek:
  - a. Membangun visi bersama
  - b. Mengidentifikasi gelagat atau gejala dini yang menunjukkan bahwa konflik yang mengandung kekerasan dapat terjadi di suatu masyarakat.
  - c. Mengkaji ciri-ciri daerah yang diduga akan dilanda konflik.
  - d. Mengajak dan melibatkan pemerintah, DPR, organisasi, lembaga, kelompok masyarakat, dan pihak-pihak lain yang penting dan berkepentingan dalam prevensi konflik.
  - e. Mendasarkan rencana pencegahan konflik berdasarkan kapasitas dan kemampuan yang dimiliki lembaga, organisasi, atau kelompok yang ikut serta dalam usaha tersebut.
  - f. Menjalin suasana saling pengertian dan kemitraan dengan pemerintah serta aparat keamanan.

Penulis mencoba memberi saran berupa langkah-langkah konkrit yang dirasa perlu dalam program kerja Polda Maluku Utara untuk lebih memprioritaskan pada program pencegahan konflik kekerasan, antara lain:

1. Polda Maluku Utara harus lebih mengoptimalkan pada pola-pola *conflict prevention* antara lain:
  - a. Melalui deteksi dini

- b. Pembaharuan data
  - c. Kajian analisis daerah
  - d. Forum silaturahmi kamtibmas
  - e. Membangun visi bersama
  - f. Menjalin kemitraan dengan tokoh-tokoh masyarakat dan instansi terkait
  - g. Melibatkan masyarakat dan instansi terkait dalam upaya bersama-sama menjaga lingkungan dan menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat Maluku Utara.
2. Lebih mengedepankan peran intelejen dan Bina Mitra sebagai ujung tombak dalam upaya indentifikasi, menghimpun dan menganalisis informasi persoalan-persoalan di masyarakat.
  3. Mengajak para tokoh masyarakat dan pemerintah terkait untuk melakukan ikrar bersama saling menjaga keutuhan persaudaraan.
  4. Peningkatan sumber daya manusia bagi personel di jajaran Polda Maluku Utara.
  5. Memprioritaskan program-program pencegahan konflik sebagai langkah antisipasi.

Relevansi penelitian tersebut dengan penelitian dalam tesis ini adalah kondisi lingkungan pada lokasi penelitian yang diwarnai oleh potensi rawan terjadinya konflik kekerasan. Di samping itu, saran dan rekomendasi solusi penulis dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi penyusunan strategi penanggulangan tindak kekerasan dalam tesis ini.

**C. Riski Burhannudin, Strategi Pencegahan Tindak Kekerasan Terhadap Tahanan Baru Anak Pria (Studi Kasus di Rutan Jakarta Timur), Tesis, Kajian Ketahanan Nasional, Program Pascasarjana UI, Jakarta, 2007.**

Penelitian ini menganalisa pola kekerasan yang dialami oleh tahanan baru anak pria di Rutan Jakarta Timur dan memberikan rekomendasi tindakan-tindakan strategis yang dapat dilakukan untuk mencegah dan meminimalisir terjadinya tindak kekerasan terhadap tahanan baru anak pria.



Dalam penelitian ini ditemukan bahwa:

1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap tahanan baru anak pria di Rutan Jakarta Timur adalah proses prisonisasi yang terjadi secara turun temurun dan berlangsung secara terus menerus, mencari kekuasaan, mencari barang guna pemenuhan kebutuhan, agar penghuni baru mentaati peraturan yang berlaku, upaya balas dendam, wujud rasa tidak suka terhadap kasus yang berhubungan dengan kesusilaan. Bentuk kekerasan terhadap tahanan baru anak pria di Rutan Jakarta Timur adalah fisik dan psikis yang terjadi secara individual maupun kolektif, kekerasan tersebut terjadi baik siang hari maupun malam hari dengan pelaksanaan yang terorganisir. Tahanan baru anak pria merupakan korban kekerasan, sedangkan pelaku kekerasan adalah penghuni lama, dalam artian penghuni yang telah masuk terlebih dahulu ke Rutan Jakarta Timur (tahanan dan narapidana).
2. Tindak kekerasan terhadap anak baru anak pria di Rutan Jakarta Timur dapat dicegah atau diminimalisir, pertama dengan pendekatan sosial meliputi kebijakan mengurangi isi, program asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas, pembangunan Lapas atau Rutan baru, putusan hakim berupa tindakan penyerahan kembali ke orang tua, penyerahan ke Departemen Sosial, diskresi polisi terhadap kasus pelanggaran hukum yang pelakunya anak ndan pemberlakuan bebas peredaran uang (BPU). Kedua, melalui pendekatan situasional dengan menggunakan teorinya **Clarke** menguraikan 16 teknik dalam upaya untuk mengurangi kesempatan dilakukannya kejahatan, yang terbagi dalam empat kelompok besar yaitu (1) *Increasing Perceived Effort*, (2) *Increasing Perceived Risk*, (4) *Removing Excuses*. Sedangkan untuk teknik (3) *Reducing Anticipated Rewards* tidak dapat digunakan karena Rutan Jakarta Timur memiliki situasi dan kondisi yang berbeda dengan Rutan atau Lapas yang lain.

Relevansi dengan penelitian dalam tesis ini adalah:

- a. Membahas permasalahan mengenai tindak kekerasan yang terjadi antar penghuni Rutan, meskipun penelitian tersebut hanya membahas

mengenai tindak kekerasan terhadap tahanan baru oleh penghuni lama, dan tidak membahas tindak kekerasan antar penghuni lainnya, serta subyek dan objek tindak kekerasan adalah tahanan anak pria.

- b. Salah satu fokus penelitian tersebut adalah strategi pencegahan tindak kekerasan yang mana hal tersebut adalah bagian dari strategi penanggulangan tindak kekerasan yang menjadi fokus penelitian ini.
- c. Solusi yang direkomendasikan penulis untuk pencegahan tindak kekerasan dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi perencanaan strategis penanggulangan tindak kekerasan pada penelitian ini.

